

**KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SITI ARBIANTI

NIM. 200802021

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Arbianti
NIM : 200802021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Suka Damai, 25 September 2001
Alamat : Desa Suka Damai, Kec. Hinai, Kab.
Langkat, Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

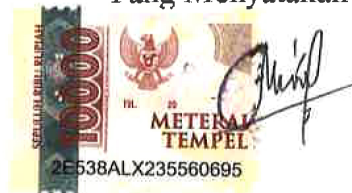
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya:

Banda Aceh, Juni 2024

Yang Menyatakan



SITI ARBIANTI
Nim. 200802021

**KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

SITI ARBIANTI

NIM. 200802021

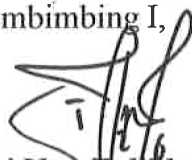
جامعة الرانيري

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

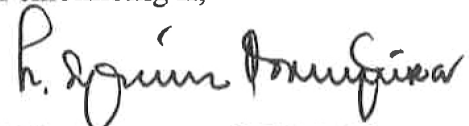
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Siti Nur Zakikha. M.Si.
NIP. 199002282018032001

Pembimbing II,



Hijrah Saputra. S.Fil., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

**KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BINJAI**

SKRIPSI

SITI ARBIANTI
NIM. 200802021

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024 M
03 Muharram 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Penguji III


Dicky Izmi Syahputra, S.IP., M.IP., M.P.A
NIP. -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muti Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Bencana banjir merupakan masalah serius yang kerap mengancam keamanan dan kesejahteraan penduduk di berbagai kota di seluruh dunia, menghadapi ancaman serius dari bencana banjir yang terus meningkat dalam frekuensi dan intensitasnya. Penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga untuk efektivitas yang optimal. Peraturan daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 adalah sebuah regulasi yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Binjai. Perda ini menjadi landasan hukum BPBD Kota Binjai dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai dan faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis teori *collaborative governance* Ansell dan Gash yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan antar lembaga, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai berjalan dengan cukup baik dan upaya bersama antar lembaga-lembaga terlibat telah memberikan hasil yang berarti dalam menghadapi tantangan bencana alam. Penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai melibatkan kolaborasi antar lembaga, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Polres, Bank Rakyat Indonesia, dan masyarakat setempat. Bentuk kolaborasi ini, Lembaga-lembaga terkait bekerja sama untuk menyebarkan informasi tentang risiko banjir, langkah-langkah mitigasi, dan prosedur evakuasi kepada masyarakat melalui kampanye sosialisasi dan media massa. Faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi ini adalah keterbatasan sumber daya, pengetahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: *Collaborative governance*, Penanggulangan Bencana Banjir, Kota Binjai

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai” ini tepat pada waktunya. Doa serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beliau menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini adalah hasil penelitian dan syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh nilai mata kuliah Skripsi. Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama penyelesaian skripsi.
5. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan serta saran selama proses bimbingan berlangsung.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syahrial dan Ibunda Mariana yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
7. Kepada cinta kasih kedua kakak saya, Eko Juanda dan Irmayani yang telah memberikan do'a serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada sahabat dan teman-teman tercinta Muhammad Arya Faqih Dirgantara, Debby Fisela, Wulandari, Dinda Rizkina, Nur Alfinabila, dan Abid Rifaldi yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi.
9. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Siti Arbianti atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun bisa menjadi pembelajaran bersama. Akhir kata penulis berharap semoga proposal penelitian ini bisa berguna bagi semua yang membacanya.

Banda Aceh, 09 Juli 2024
Peneliti

Siti Arbianti
NIM. 200802021

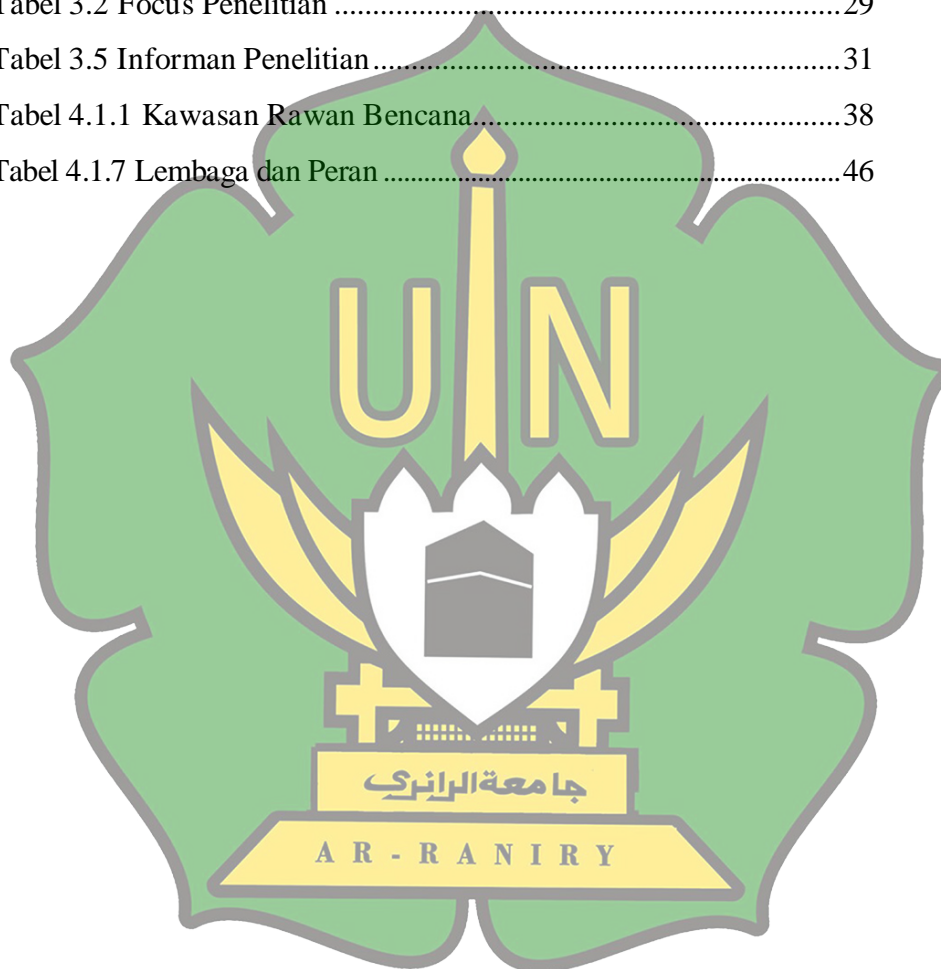
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Kolaborasi	12
2.2.2 Konsep Kelembagaan.....	18
2.2.3 Konsep Kolaborasi Antar Lembaga	19
2.2.4 Manajemen Kebencanaan	21
2.2.5 Bencana Banjir.....	24
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29

3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu	30
3.4 Jenis Sumber Data.....	30
3.5 Tabel Informan.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Kota Binjai	35
4.1.1 Fenomena Banjir.....	37
4.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	42
4.1.3 Dinas Lingkungan Hidup.....	43
4.1.4 Dinas Sosial	44
4.1.5 Kepolisian Resor.....	44
4.1.6 Bank Rakyat Indonesia.....	45
4.2 Penanggulangan Bencana.....	47
4.3 Kampung Siaga Bencana.....	48
4.4 Hasil Penelitian	49
4.4.1 Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir.....	49
4.4.2 Faktor Penghambat.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penduduk Terdampak Banjir	6
Tabel 3.2 Focus Penelitian	29
Tabel 3.5 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1.1 Kawasan Rawan Bencana.....	38
Tabel 4.1.7 Lembaga dan Peran	46



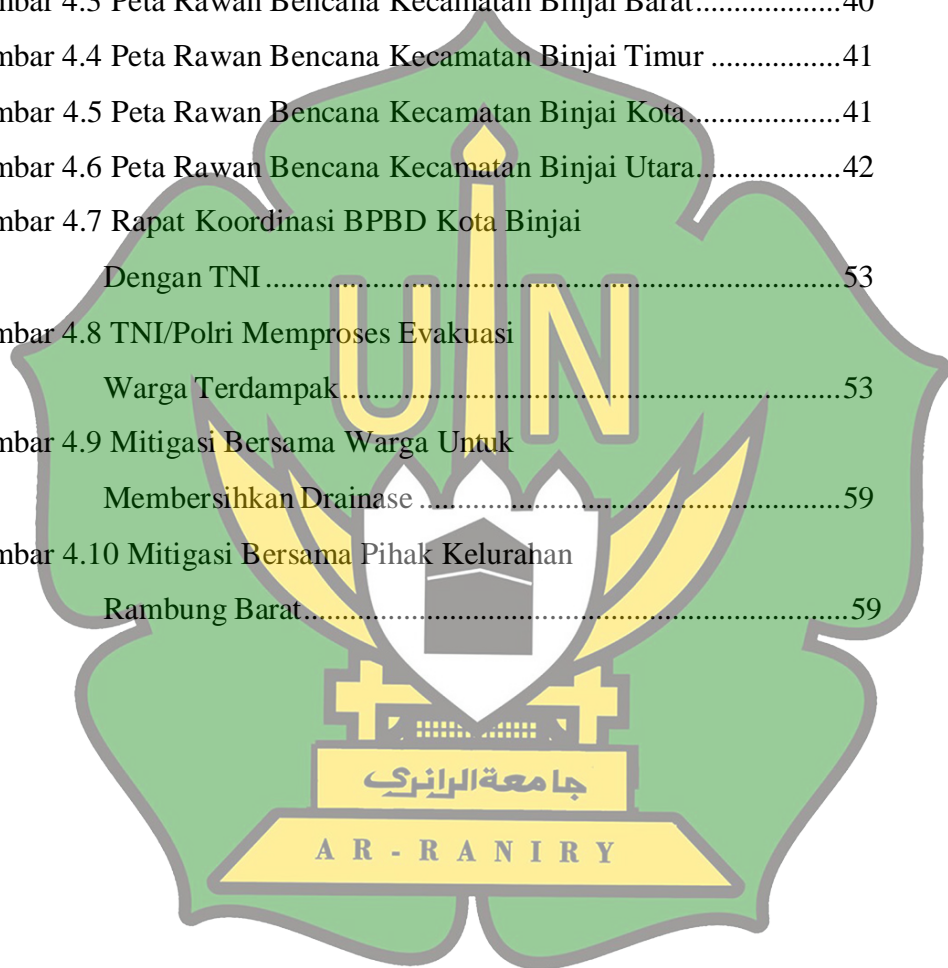
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan.....	78
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	79
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai.....	80
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	81
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Iklim Kota Binjai	36
Gambar 4.2 Peta Rawan Bencana Kecamatan Binjai Selatan.....	40
Gambar 4.3 Peta Rawan Bencana Kecamatan Binjai Barat.....	40
Gambar 4.4 Peta Rawan Bencana Kecamatan Binjai Timur	41
Gambar 4.5 Peta Rawan Bencana Kecamatan Binjai Kota.....	41
Gambar 4.6 Peta Rawan Bencana Kecamatan Binjai Utara.....	42
Gambar 4.7 Rapat Koordinasi BPBD Kota Binjai Dengan TNI.....	53
Gambar 4.8 TNI/Polri Memproses Evakuasi Warga Terdampak.....	53
Gambar 4.9 Mitigasi Bersama Warga Untuk Membersihkan Drainase	59
Gambar 4.10 Mitigasi Bersama Pihak Kelurahan Rambung Barat.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana banjir merupakan masalah serius yang kerap mengancam keamanan dan kesejahteraan penduduk di berbagai kota di seluruh dunia, menghadapi ancaman serius dari bencana banjir yang terus meningkat dalam frekuensi dan intensitasnya. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian material, namun juga berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan masyarakat. Memang, banjir ialah salah satu contoh bencana alam yang sering kali terjadi pada berbagai belahan dunia.¹ Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.² Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi; permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut; wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air. Meskipun berada di wilayah “bukan langganan banjir”. Setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini.³

Banjir adalah menggenangnya daratan (yang biasanya kering) akibat bertambahnya volume air. Hampir setiap negara di dunia mengalami banjir, bahkan negara maju sekalipun. Indonesia adalah salah satu negara yang seringkali terjadi

¹ BPBD Provinsi Jawa Timur:” Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya” 5/2/2024

² PPID Pelaksana BPSDM Prov Jateng “ Bencana Banjir” 5/2/2024

³<https://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/bencana/Apa-itu-banjir-dan-cara-menghadapi-bencana-banjir.pdf> 5/2/2024

banjir.⁴ Indonesia mengalami banjir terbanyak di tahun 2020 dengan 1.531 peristiwa. Peristiwa banjir pada tahun 2021 turun menjadi 1.181 kali, disusul sebanyak 1.170 kali banjir di tahun 2023.⁵ Banjir dapat menyebabkan kerugian besar dalam hal kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya sumber daya.⁶ Oleh karena itu, penanggulangan bencana banjir menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam merupakan provinsi Sumatera Utara. Sumut menjadi provinsi yang paling terdampak banjir di tahun 2023. Banjir sudah terjadi sebanyak 112 kali di Sumut atau setara dengan 9% dari jumlah banjir yang terjadi di wilayah tersebut.⁷ Di tahun 2017, beberapa wilayah/kota di Sumut yang terdampak banjir menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, wilayah banjir mencakup Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, serta Kabupaten Asahan.⁸ Kondisi geografi dan topografi di wilayah ini mempengaruhi aliran air dan drainase, yang dapat meningkatkan kemungkinan banjir saat hujan lebat atau meluapnya sunga-sungai besar disekitarnya.

Dari uraian diatas diketahui bahwa kota-kota besar di Sumatera Utara tidak jarang mengalami peristiwa banjir seperti Kota Medan yang selalu rawan banjir,

⁴ Akhmad Nafarin; Sidharta Adyatma; Deasy Arisanty; Selamat Riadi “ Model Pengelolaan Daerah Rawan Bencana Banjir Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” 7/2/2024

⁵ BNPB “Tren Banjir Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Tiga Tahun Terakhir” 4/3/2024

⁶ BPBD Provinsi Jawa Timur “ Banjir: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya” 4/3/2024

⁷ Nabilah Muhamad “Sumatera Utara, Provinsi Paling Sering Dilanda Banjir Pada 2023” 6/4/2024

⁸ BPBD Sumatera Utara (6/4/2024)

terutama di daerah yang dekat dengan sungai. Selain itu, kota di Sumut yang rawan banjir adalah kota Binjai.⁹ Kota Binjai memiliki faktor geografis dan topografi yang mempengaruhi pola aliran air dan penanganan drainase. Kota Binjai memiliki sejarah banjir yang signifikan, kejadian banjir berulang menunjukkan bahwa masyarakat dan infrastruktur rentan terhadap bencana tersebut. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk memahami faktor penyebab bencana, dampaknya, dan cara untuk menguranginya. Kota Binjai yang terletak di provinsi Sumatera Utara, seluas kurang lebih 9.023,62 hektar atau 0,13% dari luas provinsi Sumut, merupakan daerah proyek pembangunan mebidang yang mencakup Medan, Binjai dan Deli Serdang.¹⁰

Kota Binjai tentunya tidak luput dari bencana alam, khususnya bencana alam salah satunya banjir. Belakangan ini Kota Binjai tidak jarang mengalami banjir akibat meningkatnya curah hujan serta rendahnya daya serap di Kota Binjai. Potensi bencana alam di daerah Binjai adalah kemungkinan terjadinya banjir sebab kondisi geologi tanah yang mempunyai kemiringan 3,15% serta juga berada pada kawasan rawan banjir dan meningkatnya debit air Sungai, dan perluasan lahan sawah dan tanah terbuka di sepanjang daerah aliran Sungai (DAS) Bangkatan.¹¹

Undang-Undang Penanggulangan bencana Alam Nomor 24 Tahun 2007.

Undang-undang ini mengatur utama-utama bentuk penyelenggaraan penanggulangan

⁹ Rizky Chairil, (2020) “Analisis Tingkat Kerentanan dan Karakteristik Banjir di Kecamatan Bejenis Kota Tebing Tinggi” 6/3/2024

¹⁰ Linya Ketzia Chlodya Br Tobing “Strategi Komunikasi BPBD Dalam Mensosialisasikan Informasi Bencana Banjir di Kota Binjai” 4/3/2024

¹¹ Linya Ketzia Chlodya Br Tobing “Strategi Komunikasi BPBD Dalam Mensosialisasikan Informasi Bencana Banjir di Kota Binjai” 4/3/2024

bencana alam yang ialah tugas serta kewenangan pemerintah dan perangkat wilayah yang wajib dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, komposisi, koordinasi dan terintegrasi.¹²

Penanggulangan bencana baik pada taraf nasional juga wilayah tidak dapat dilakukan sendiri oleh forum penanggulangan bencana, hal ini harus melibatkan peran rakyat serta organisasi bencana lainnya, dan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan sektor lintas sektor yang terdapat di wilayah tersebut.¹³ Salah satu pendekatan yang dapat memperkuat upaya penanggulangan bencana banjir adalah kolaborasi antar Lembaga. Kolaborasi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mendiskusikan penyelesaian suatu tugas karena akan sangat berguna di kehidupan masa depan.¹⁴

Dalam konteks Kota Binjai, berbagai Lembaga dan instansi pemerintah, seperti Pemerintah Daerah Kota Binjai yang bertindak sebagai koordinator utama dalam penanggulangan bencana. Perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana adalah semua tanggung jawab mereka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga yang khusus menangani bencana. BPBD bertanggung jawab untuk merencanakan rencana tanggap darurat, mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana di lapangan, dan mengelola respons bencana secara keseluruhan. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam aspek

¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

¹³ <https://pekalongankota.gp.id/berita/penanggulangan-bencana-perlu-kerjasama-lintas-sektor.html>

¹⁴ Maharani, Punaji, & Saida (2017) "Pemanfaatan Social Learning Network Dalam Mendukung Keterampilan Kolaborasi Siswa"

teknis dan pengelolaan yang berkaitan dengan bencana banjir. Dinas ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi sumber banjir seperti penebangan pohon, pencemaran, dan masalah infrastruktur yang terdapat meningkatkan kemungkinan banjir. Lembaga Non-Pemerintah, memiliki peran mendasar dalam mengelola dan merespon bencana banjir.¹⁵ Mereka memberikan bantuan tambahan yang melengkapi upaya pemerintah dengan menyediakan makanan, obat-obatan, dan peralatan darurat.

Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 perihal Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan bencana wilayah Binjai. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penanggulangan bencana di daerah tersebut.¹⁶

Dalam penelitian ini, pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai akan dianalisis secara mendalam. Penelitian ini akan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang mungkin mencegah kolaborasi yang efektif, serta potensi manfaat yang dapat dihasilkan dari kerjasama yang lebih baik. Inti dari semangat kolaboratif adalah gagasan perihal proses berulang di mana prinsip-prinsip keterlibatan (komunikasi), motivasi bersama (kepercayaan, komitmen, timbal balik) serta kerja tim (kepemimpinan) saling memperkuat dalam lingkaran umpan balik positif buat meningkatkan kualitas serta dinamika manajemen

¹⁵ Linya Ketzia Chlodya Br Tobing “Strategi Komunikasi BPBD Dalam Mensosialisasikan Informasi Bencana Banjir di Kota Binjai” 4/3/2024

¹⁶ PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Binjai

keputusan kolaboratif.¹⁷ Data sementara BPBD Kota Binjai menyebutkan banjir terjadi pada empat kecamatan yakni Binjai Utara, Binjai Kota, Binjai Timur, serta Binjai Selatan. Hampir 3.585 jiwa terdampak banjir akibat banjir sungai di 6 Oktober 2023 luapan sungai Mencirim.¹⁸ Masalah kurangnya kolaborasi antar lembaga menjadi alasan penting untuk meneliti kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir. Dengan melihat kerja sama yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana kerja sama antar lembaga dapat diperbaiki dan dioptimalkan dalam menangani bencana banjir di Kota Binjai.

Adapun jumlah penduduk yang terdampak banjir menurut data BPBD, sebagai berikut :

NO	Daerah Yang Terdampak	Jumlah Jiwa Yang Terdampak
1.	Binjai Utara	80 Jiwa
2.	Binjai Kota	1892 Jiwa
3.	Binjai Timur	1316 Jiwa
4.	Binjai Selatan	297 Jiwa
	Jumlah	3.585 Jiwa

Tabel 1.1 Data Penduduk Terdampak Banjir

Pada tahun 2021 hujan deras dengan intensitas lebat serta kiriman air dari hulu menyebabkan meluapnya Sungai Bingai, Sungai Bangkatan dan daerah aliran sungai Kota Binjai sehingga terjadi banjir menggenangi 9 Kelurahan di 4 Kecamatan. Ketinggian air mencapai 20-60 cm. Data yang diperoleh dari dinas kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait maka tidak ada jumlah korban jiwa.¹⁹

¹⁷ Administratio,Civil Society (*Indonesian Islamic Business Forum*) Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda Vol. 13 (2) 2022: 177-190

¹⁸ <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-d-KOTA-BINJAI-SUMATERA-UTARA-06-10-2023-84>

¹⁹ Kementerian Kesehatan “Banjir di Kota-Binjai, Sumatera-Utara” 4/3/2024

Banyak sekali instansi yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Binjai, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan bencana kepada warga terdampak banjir di Kota Binjai. Bank BRI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan banyak sekali pihak untuk membangun sinergi pada penyaluran donasi kepada korban banjir untuk mengurangi beban rakyat serta mempercepat pemulihan pascabencana. Instansi lain yang terlibat dalam penyaluran bantuan diantaranya: Polsek Binjai, Kampung Siaga Bencana, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan Hidup.²⁰

Saat bencana terjadi pemerintah tidak memberikan respon, LSM serta masyarakat yang peduli turun tangan untuk membantu beberapa kelompok yang terkena akibat bencana melalui partisipasi sosial pada rakyat. Komponen penanggulangan bencana meliputi pengembangan kebijakan pembangunan rawan bencana, penerapan tindakan pencegahan bencana, penanganan situasi darurat, serta pembangunan kembali daerah yang terkena dampak.²¹

Hasil observasi awal peneliti, banjir sangat sering terjadi di wilayah Kota Binjai karena curah hujan yang tinggi sehingga memicu terjadinya luapan air Sungai Mencirim. Air sungai tersebut meluap karena sungai yang dangkal serta banyaknya sampah.²² Kota Binjai, memiliki banyak lembaga penanggulangan bencana, termasuk pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan organisasi masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan untuk meneliti bagaimana lembaga-

²⁰ Hasil wawancara awal peneliti dengan tokoh di Kota Binjai (20/11/2023)

²¹ Administratio, Civil Society (*Indonesian Islamic Business Forum*) Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda Vol. 13 (2) 2022: 177-190

²² Hasil Observasi (12/02/2024)

lembaga ini bekerja sama dalam menangani bencana banjir. Penelitian di Kota Binjai bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kerja sama yang ada, serta mencari solusi yang lebih efektif dan efisiensi dalam mengelola bencana banjir.

Berdasarkan fenomena di atas yang penulis dapatkan bahwasannya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana bisa menjadi sarana pertukaran pendapat dan pikiran mengenai berbagai pengetahuan lainnya dan memungkinkan lembaga untuk mencakup wilayah yang lebih luas dan memberikan bantuan kepada lebih banyak korban bencana. Dengan kerja sama yang kuat, lembaga-lembaga dapat merespon bencana dengan lebih cepat, yang penting dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“KOLABORASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BINJAI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi terkait :

1. Pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai.
2. Mengeksplorasi hambatan-hambatan yang mungkin mencegah kolaborasi yang efektif, serta potensi manfaat yang dapat dihasilkan dari kerjasama yang lebih baik.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
2. Apa saja faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi dinas terkait yang memiliki wewenang dalam mencegah dan mengatasi bencana banjir di Kota Binjai.
2. Sebagai perbandingan bagi peneliti lainnya terkait banjir pada lokasi yang berbeda.
3. Menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai bencana alam banjir yang menjadi salah satu permasalahan lingkungan.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan.²³

2. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan upaya buat mencegah, menangani, atau mengatasi suatu keadaan, termasuk tindakan preventif dan penekan.

3. Penanggulangan Bencana

Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana mengimplementasikan manajemen bencana: serangkaian tindakan yang meliputi pengembangan kebijakan, pengembangan risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi.²⁴



²³ Choirul Saleh “Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi” Modul 01 (14/3/2024)

²⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Irfani dengan judul “Kolaborasi pentahelix dalam upaya pengurangan risiko bencana pada destinasi wisata di Desa Kalanganyar, Sidoarjo”. Pentahelix berkolaborasi dalam pengurangan risiko bencana di destinasi wisata, baik wisata pedesaan di Kabupaten Sidoarjo maupun wilayah rawan bencana yang masuk kategori sedang menurut data Indeks Risiko bencana Indonesia 2020, seperti bencana alam yang terjadi dan bencana non alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah wilayah Sidoarjo memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan bencana di daerah Sidoarjo serta menyusun rencana serta program pencegahan bencana dengan melakukan mitigasi dampak bencana sebelum dan sehabis bencana terjadi.²⁵
2. Collaborative governance dalam penanganan banjir di Kota Medan, oleh Nahut Tua Parlindungan Sihalohe. Terdapat enam kriteria dasar tata kelola kolaboratif: lembaga wajib dibuat oleh otoritas publik; peran rakyat sipil harus dilibatkan; Peserta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta tidak hanya sekedar berunding;

²⁵ Mochammad Arfani “Kolaborasi pentahelix dalam upaya pengurangan risiko bencana pada destinasi wisata di desa Kalanganyar Sidoarjo”

lembaga yang diselenggarakan secara resmi; Tujuan forum ini ialah untuk mengambil keputusan melalui mufakat; penekanan kerjasamanya artinya pada kebijakan atau administrasi publik. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk menemukan bentuk kerja sama ideal pada penanganan banjir yang bisa dilaksanakan sebelum, waktu, serta pasca banjir Kota Medan. Penelitian ini pula menegaskan siapa saja yang berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif.²⁶

3. Strategi Pemerintah Provinsi Riau serta pemangku kepentingan penanganan Covid-19 di Provinsi Riau. Penanggulangan bencana COVID-19 di Provinsi Riau sangat baik. Hal ini terlihat dari indikator kesiapsiagaan dan efektivitas Pemerintah Provinsi Riau yang telah menyusun peraturan untuk menunda penyebaran virus corona serta menerapkan pengurangan risiko bencana..²⁷

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kolaborasi

Teori kolaborasi menurut Crish Ansell Alison Gash adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga seni dan pendidikan. Ini melibatkan kerjasama antara individu atau entitas yang

²⁶ Nahot Tua Parlindungan Sihaloho “Collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kota Medan”

²⁷ Dimas, Syamsul, Lilik, Pujo, & Herlina (2022) “Strategi Pemerintah Provinsi Riau dan Stakeholder Yang Bertanggung Jawab Dalam Penanganan Covid-19 di Prov Riau”

memiliki tujuan bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai sendiri. Dalam konteks bisnis, kolaborasi dapat mengarah pada inovasi, peningkatan efisiensi, dan penguatan posisi pasar.²⁸

Ansell dan Gash menggambarkan pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan publik dimana pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.²⁹

Salah satu aspek penting dari kolaborasi adalah kemampuan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Melalui kolaborasi, individu atau organisasi dapat saling mengisi dan memperkuat kelemahan dan kelebihan masing-masing, menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat berkembang dan diimplementasikan.³⁰

Kolaborasi tidak terbatas di saat waktu tertentu dan melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat individu, taraf kelompok kerja, serta tingkat organisasi. ketika bekerja sama, sangat penting untuk tahu kegiatan lembaga-forum publik. Itu sebabnya penelitian kooperatif lebih penekanan di level organisasi publik.³¹

²⁸ Chris Ansell Alison Gash, "Collaborative Governance In The Theory And Practic University Of California, Berkeley," *Journal Administration Reseach and Theory* JPART 18 (13 November 2007) : 543-571

²⁹ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In The Theory and Practice. "Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. (20/3/2024)

³⁰ Wikan Galoh Widyarto, "Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi," *Jurnal Nusantara* Vol. 4, no. Nomor 2 (Oktober 2017): 100-106

³¹ Anderson, E. T. & J. McFarlane, *Community as Partner Theory and Practice inNursing* 4th ED. Philadelphia, 2004. (6/3/2024)

Proses terbentuknya tata collaborative governance dimana pemerintah, sektor swasta serta warga saling terkait, mencakup::

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Di fase dialog tatap muka stakeholder terkait diharapkan dapat membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian serta komitmen terhadap proses kolaborasi yang direncanakan dan dilaksanakan..

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan sangat penting dalam kolaborasi, sebab kolaborasi bukan sekedar perundingan , akan tetapi juga membangun kepercayaan dengan setiap pihak yang berkepentingan.

3. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen terhadap proses merupakan sebuah langkah untuk mengembangkan keyakinan bahwa perundingan ialah cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang sempurna untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Komitmen memerlukan hukum yang jelas, adil serta transparan bagi semua peserta..

4. *Shared understanding* (saling memahami)

Pada titik tertentu, stakeholder yang terlibat pada proses kolaboratif harus mengembangkan proses sesuai pemahaman bersama perihal apa yang dicapai bersama. Pemahaman bersama juga diartikan sebagai proses

mengintegrasikan pemahaman terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan..

5. *Intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Di titik ini diharapkan bisa mencapai kesepakatan mengenai hasil akhir yang ingin dicapai melalui kerja sama. Perencanaan dan penyempurnaan hasil akhir diharapkan bisa membantu membangun kepercayaan serta komitmen terhadap kemampuan setiap orang dalam melaksanakan tugas utama mereka sebagai stakeholder untuk memecahkan permasalahan.³²

Tujuan kolaborasi adalah menciptakan hasil yang lebih baik atau lebih besar daripada yang bisa dicapai secara individu. Dengan bekerja bersama, individu, organisasi, atau entitas yang terlibat dalam kolaborasi bertujuan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.³³

Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bagaimana pentingnya kolaborasi dalam konteks interaksi sosial dan organisasi. Mereka mengemukakan bahwa kolaborasi adalah proses dimana individu-individu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dengan fokus pada bagaimana interaksi dan kerja sama mempengaruhi hasil akhir. Teori ini menekankan peran komunikasi, saling pengertian, dan pembagian tugas dalam menciptakan kolaborasi yang efektif.³⁴

³² Asropin Gunawan, Muhammad Farid Ma'ruf. "Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu lintas". *Journal of Public Sector Innovation*, 20/3/2024

³³ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (7/3/2024)

³⁴ Raizatul Rahmah. "Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh." *Skripsi.*, (22/3/2024)

1. Karakteristik Dan Prinsip Dasar Kolaborasi

Kolaborasi memiliki delapan karakteristik, yaitu :

- a) Kepercayaan
- b) Keterlibatan
- c) Interdependensi
- d) Keterbukaan
- e) Keterkaitan Tujuan
- f) Keragaman
- g) Keterpaduan
- h) Ketergantungan³⁵

2. Nilai Dasar Kolaborasi

Dalam melaksanakan kolaborasi, terdapat tujuh nilai dasar yang menjadi landasan untuk meningkatkan hubungan kerja. Pertama, "Menghormati orang lain" menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan posisi setiap individu dalam kolaborasi. Kedua, "Penghargaan dan integritas" menyoroti pentingnya kehormatan dan integritas dalam perilaku individu, yang merupakan nilai yang diakui dalam berbagai budaya. Ketiga, "Memiliki rasa bersekutu" menekankan pentingnya kepemilikan bersama dan keselarasan visi dan tujuan. Keempat, "Konsensus" menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan. Kelima, "Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat"

³⁵ Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, Strategic Management: Adynamic Perspective, 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009) 7/3/2024

menekankan pentingnya setiap individu bertanggung jawab penuh atas kontribusinya dan menerima tanggung jawab atas hasilnya. Keenam, "Hubungan saling mempercayai" menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan kerja. Ketujuh, "Pengakuan dan pertumbuhan" menekankan pentingnya memberikan pengakuan dan mendorong pertumbuhan bagi semua anggota tim atau kelompok dalam lingkungan kerja yang kolaboratif.³⁶

3. Hambatan dan Efektifitas Dalam Kolaborasi

Kolaborasi tidak dapat berjalan tanpa permasalahan serta kendala, ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan kegagalan kolaborasi.

1. Kurangnya Komunikasi: Komunikasi yang buruk atau tidak efektif dapat menjadi hambatan besar dalam kolaborasi. Ketidaktepatan dalam penyampaian informasi, kurangnya umpan balik, atau ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan baik dapat menghambat pemahaman dan koordinasi antara anggota tim.
2. Perbedaan Tujuan atau Prioritas: Ketika anggota tim memiliki tujuan atau prioritas yang berbeda, kolaborasi bisa menjadi sulit. Konflik kepentingan atau perselisihan tentang arah atau fokus proyek dapat menghambat kemajuan dan mengurangi efektivitas kolaborasi.

³⁶Djumara, Noorsyamsa.2008. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI. H. 36-38

3. Kurangnya Kepercayaan: Kepercayaan adalah dasar dari kolaborasi yang sukses. Ketika anggota tim tidak percaya satu sama lain atau kepada pemimpin proyek, itu dapat menghambat kolaborasi dan menghasilkan keraguan atau ketidakpastian.
4. Perbedaan Budaya atau Nilai: Kolaborasi sering melibatkan individu atau organisasi dari latar belakang budaya dan nilai yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghasilkan kesalahpahaman atau konflik yang menghambat kemajuan proyek.

Peneliti memilih teori kolaborasi dari Ansell dan Gash karena teori ini menawarkan pandangan yang kaya dan mendalam tentang dinamika kolaborasi dalam konteks kebijakan publik atau manajemen organisasi. Teori kolaborasi ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana dan mengapa kolaborasi terbentuk, bagaimana proses kolaborasi berlangsung, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi. Ansell dan Gash meneliti kolaborasi dalam konteks hubungan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah, atau organisasi-organisasi sektor publik dan swasta. Teori ini menyoroti pentingnya kepercayaan, keterbukaan, kepentingan bersama, dan komunikasi yang efektif dalam memfasilitasi kolaborasi yang berhasil.

2.2.2 Konsep Kelembagaan

Konsep kelembagaan mengacu pada struktur, proses, dan norma yang mengatur cara individu atau kelompok berinteraksi dalam suatu organisasi atau sistem. Ini melibatkan pembentukan lembaga-lembaga atau entitas yang memiliki peran dan

tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat atau dalam konteks yang lebih sempit, seperti dalam suatu organisasi atau pemerintahan..³⁷

Berdasarkan penelitian Ruttan dan Hayami, lembaga artinya suatu grup atau organisasi sosial yang mengutamakan koordinasi antar anggotanya dengan harapan setiap orang dapat bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.³⁸

Lembaga merupakan wadah atau tempat di mana individu atau kelompok bertindak atau beroperasi dalam suatu sistem yang terstruktur. Lebih khusus lagi, lembaga adalah entitas yang memiliki aturan, norma, dan struktur organisasional yang mengatur perilaku dan interaksi anggotanya. Ini bisa berupa organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, atau lembaga pendidikan, atau bisa bersifat informal seperti kelompok kepentingan atau jaringan kerja.³⁹

2.2.3 Konsep Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga adalah upaya bersama antara dua atau lebih lembaga untuk mencapai tujuan bersama atau memecahkan masalah tertentu. Kolaborasi semacam ini melibatkan pertukaran sumber daya, informasi, atau keahlian untuk menciptakan sinergi yang lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh setiap lembaga

³⁷ Modul 01. Nadiroh. "Teori dan Konsep Kelembagaan Lingkungan" (20/3/2024)

³⁸ Ruttan, & Hayami "Definisi Lembaga", 1984. (20/3/2024)

³⁹ Widiono, Genut Wahyu. "Acitya Untuk Indonesia" (20/3/2024)

secara individu. Secara lebih rinci, kolaborasi antar lembaga memiliki beberapa ciri khas:

a. Keterlibatan pihak-pihak yang berbeda

Kolaborasi antar lembaga melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang beragam dan sering kali bertentangan.

b. Pertukaran sumber daya

Kolaborasi memungkinkan pertukaran sumber daya seperti dana, tenaga kerja, teknologi atau keahlian khusus. Dengan cara ini, lembaga dapat saling melengkapi kekurangan mereka dan meningkatkan efektivitas operasional mereka.

c. Menciptakan nilai tambah

Kolaborasi antar lembaga bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar daripada yang bisa dicapai oleh setiap lembaga secara individual.

d. Pengelolaan konflik

Kolaborasi sering kali melibatkan penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat. Pengelolaan konflik yang efektif penting untuk memastikan bahwa kolaborasi berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

e. Komunikasi dan koordinasi yang efektif

Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan kolaborasi antar lembaga. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terinformasi dengan baik tentang tujuan, strategi, dan progres kolaborasi.⁴⁰

2.2.4 Manajemen Kebencanaan

Manajemen penanggulangan bencana merupakan proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko, mengatasi dampak, serta memulihkan kondisi pasca bencana.⁴¹

Undang-Undang Penanggulangan bencana No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan tanggung jawab dan kewenangan otoritas nasional serta wilayah pada penanggulangan bencana alam. Penanggulangan akibat bencana alam wajib dilakukan secara terencana, menyeluruh, terkoordinasi serta terpadu, dengan memperhatikan berbagai tahapan penanggulangan dampak bencana alam: keadaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, situasi bencana, yang memerlukan pendekatan berbeda. pula. Selama tahap tanggap darurat, pemerintah menyediakan dana siap pakai selain dari APBN dan APBD, yang dikelola melalui mekanisme khusus dengan pertanggungjawaban yang jelas. Pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam penanganan bencana.⁴²

⁴⁰ Annette M. Boaz, Huw T.O. Davies, Alec Fraser, dan Sandra Nutley. "Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in the United States". Vol. 67. Hal. 9-18 (20/3/2024)

⁴¹ Modul 02 "Modul Manajemen Penanggulangan Bencana; Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir" Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Rekonstruksi, 2017 (9/3/2024)

⁴² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah upaya mencegah dan mengurangi potensi bahaya untuk mengatasi kerentanan yang terdapat. Ada lima contoh manajemen bencana:

- a. Disaster management continuum model. Ini ialah salah satu model yang paling populer karena memiliki langkah-langkah yang jelas dan praktis diterapkan. Fase ini mencakup tanggap darurat, pertolongan, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.
- b. Pre-during-post disaster model. Model penanggulangan bencana ini dibagi ke dalam fase-fase operasional seputar bencana. Tahap operasional terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana.
- c. Contract-expand model. Model penanggulangan bencana ini diterapkan di wilayah rawan bencana, dengan menggunakan seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- d. The crunch and release model. Model penanggulangan bencana ini lebih menitikberatkan di upaya pemulihan bencana untuk mengurangi kerentanan. Jika kerentanan suatu masyarakat terhadap bencana kecil, kecil kemungkinan terjadinya bencana, bahkan jika ancamannya masih ada.

- e. Disaster risk reduction framework. Model penanggulangan bencana ini lebih fokus pada identifikasi risiko bencana dari segi kerentanan dan bahaya, dan membangun kapasitas pengurangan risiko bencana.⁴³

Kota Binjai banyak memiliki masalah banjir karena perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan keadaan geografisnya. Disaster risk reduction framework memungkinkan pendekatan yang komprehensif dan proaktif untuk mengurangi risiko dan dampak banjir. Model penanggulangan bencana ini juga menekankan kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif, serta memastikan bahwa tindakan penanggulangan bencana selaras dengan upaya pembangunan berkelanjutan.

Penanggulangan berarti pencegahan efektif yang membatasi terjadinya suatu peristiwa atau tindakan serta mencegah terulangnya kembali..

Penanggulangan bencana merupakan tantangan kompleks yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.⁴⁴ Tujuan utama dari penanggulangan adalah untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Berikut adalah rincian tentang penanggulangan bencana:

- a. Pemahaman risiko bencana; Langkah pertama dalam penanggulangan bencana adalah pemahaman mendalam terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah.

⁴³ Dema, Rivaldhi, Arimurti: *Model Manajemen Bencana Gunung Meletus Di Gunung Kelud*, “Pengutipan; Saputra, Alfaridzi, Kriswibowo, A. (2020). *Public Administration Journal of Research*” (9/3/2024)

⁴⁴ Smith, J., & Jones, A. *International Journal Of Disaster Risk Reduction*. “Community-based Approach to Disaster Management: A Case Study of Floods in Jakarta” 2020 (15/3/2024)

- 
- b. Perencanaan mitigasi; Setelah pemahaman risiko bencana diperoleh, langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi mitigasi untuk mengurangi kerentanan dan menghindari dampak yang lebih besar.
 - c. Persiapan darurat; Penanggulangan bencana juga melibatkan persiapan darurat yang mencakup penyusunan tanggap darurat, pelatihan petugas penanggulangan bencana, serta pengadaan peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk merespon bencana dengan cepat dan efektif.
 - d. Tanggap darurat; Ketika bencana terjadi, respon darurat harus dilakukan segera untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan medis, dan menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat perlindungan. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam tahap ini.
 - e. Rehabilitasi dan rekonstruksi; Setelah bencana mereda, langkah berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak. Meliputi pemulihan ekonomi, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, serta dukungan psikososial bagi korban yang trauma.⁴⁵

2.2.5 Bencana Banjir

Bencana banjir ialah peristiwa alam yang dapat terjadi kapan saja serta sering mengakibatkan korban jiwa serta harta benda. Kerusakan dampak banjir bisa berupa kerusakan bangunan, hilangnya barang berharga, dan hilangnya akses ke kantor atau

⁴⁵ Kumar, A., & Gupta, I. 2019. "Disaster Management: A Comprehensive Riview". International Journal Of Disaster Risk Reduction (15/3/2024)

sekolah. Meskipun banjir tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikendalikan serta dampaknya diminimalkan.⁴⁶

Bencana adalah hasil dari interaksi antara tekanan (pressure) yang memicu kerentanan (vulnerability) suatu masyarakat, dan sejumlah elemen yang melepaskan (release) dampak tersebut, seperti pemicu alami atau teknologi. Bencana banjir terjadi ketika tekanan dari faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, perubahan iklim, pembangunan yang tidak teratur, dan kurangnya infrastruktur pengendalian banjir bertemu dengan kerentanan masyarakat terhadap banjir.⁴⁷

Adapun beberapa jenis banjir, yaitu:

a. Banjir sungai

Banjir sungai terjadi ketika air sungai meluap dari batasnya dan membanjiri wilayah sekitarnya. Faktor penyebabnya termasuk curah hujan yang tinggi atau bendungan yang pecah.⁴⁸

b. Banjir bandang

Banjir bandang biasanya terjadi dengan cepat dan biasanya disebabkan oleh hujan lebat. Banjir bandang sering kali sangat merusak dan berbahaya karena kecepatan dan volume air yang tinggi.⁴⁹

⁴⁶ Aprilia Findayani, Jurnal Geografi “ Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang”. (20/3/2024)

⁴⁷ Ilan Kelman. “ Understanding Vulnerability to Natural Hazards: A Disaster Risk Production Model (DRP)”. (20/3/2024)

⁴⁸ Smith, J. D., & Johnson, K. L. “A Comparative Analysis of Riverine, Flash, and Coastal Flooding Events.” (20/3/2024)

⁴⁹ Garcia, M. A., & Martinez, R. P. (2019). “Understanding Flash Floods: Causes, Impacts, and Mitigation Strategies.” (20/3/2024)

c. Banjir rob

Banjir rob biasa dikenal sebagai banjir pasang atau banjir laut, terjadi ketika air laut naik secara tiba-tiba dan membanjiri wilayah pantai yang rendah.⁵⁰

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang dipergunakan untuk merencanakan dan menganalisis suatu penelitian. Sesuai tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, dan pertanyaan yang diajukan, berikut adalah disajikan kerangka pemikiran pemodelan penelitian yang hendak diteliti :



⁵⁰ Wang, L., & Liu, S. "Tidal Flooding Vulnerability Assesment in Coastal Cities." (20/3/2024)

Kolaborasi Antar Lembaga Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai

PERDA Kota Binjai No 3 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
BPBD Kota Binjai :

1. BPBD
2. Dinas Sosialis
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepolisian

Collaborative Governance:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)
2. *Trust building* (membangun kepercayaan)
3. *Commitment to the process* (komitmen terhadap proses)
4. *Shared Understanding* (saling memahami)
5. *Intermediate outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Faktor Penghambat:

1. Pemahaman risiko
2. Rencana penanggulangan bencana
3. Ketersediaan sumber daya
4. Respon cepat

Mengevaluasi Kendala Dan Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai

Peneliti menentukan judul “Kolaborasi Antar lembaga Penanggulangan Bencana di Kota Binjai” dengan menggunakan UU No. 24 Tahun 2007. Penelitian ini berfokus di kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan banjir di kota Binjai.. Penekanan pada analisis faktor-faktor penghambat memberi kesempatan untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi dalam upaya kolaborasi tersebut, sementara penyelidikan terhadap strategi peningkatan efektifitas memberikan wawasan tentang cara mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori dan indikator Anshel dan Gash karena kedua teori tersebut relevan dalam konteks kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir. Teori tersebut dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis interaksi antar lembaga, dinamika kelompok, dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kolaborasi.

Indikator kedua teori tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kolaborasi dan koordinasi antar lembaga, serta untuk mengevaluasi efektivitas kerja sama mereka dalam konteks penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Data tersebut disusun dalam kalimat yang menggambarkan situasi secara alami atau dalam suasana yang wajar, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi

Selama penelitian, pengumpul data utama adalah peneliti yang terjun secara langsung ke lapangan dan mempelajari data melalui wawancara mendalam. Subjek penelitian berada pada situasi yang sama dengan peneliti. Peneliti dianggap sebagai partisipan, konsultan, atau kawan penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

NO	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	<i>Collaborative Governance</i>	1. Obrolan tatap muka 2. Membangun kepercayaan 3. Perhatikan prosesnya 4. Saling memahami 5. Hasil akhir yang dicapai	Ansell, C., & Gash, A. (2008)

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Faktor Penghambat	1. Pemahaman risiko 2. Rencana penanggulangan bencana 3. Ketersediaan sumber daya 4. Respon cepat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

3.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitiannya adalah suatu wilayah di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kota Binjai. Lokasi penelitian ini dipilih sebab curah hujan yang sangat tinggi dan sehingga mengakibatkan air sungai di kota Binjai..

3.4 Jenis Sumber Data

Penelitian kualitatif mengacu pada sumber data utama, yaitu perkataan serta tindakan, dan data tambahan dari dokumen dan asal lainnya. Penelitian dengan memakai observasi serta wawancara dengan dua sumber data primer:

1. Sumber Data Primer:

Ini merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama percobaan dan aktivitas lapangan. Data utama ini ialah hasil langsung interaksi antara peneliti dengan subjek atau informan dalam konteks penelitian. Contohnya adalah hasil wawancara dengan peneliti, observasi langsung, serta catatan lapangan.

2. Sumber Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumenter seperti buku, majalah, literatur atau dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.. Data sekunder ini diambil langsung dari objek penelitian dan dapat digunakan sebagai pembandingan.

3.5 Tabel Informan

No	INFORMAN	JUMLAH
1.	Koordinator Pusdalops Darurat BPBD Kota Binjai	1
2.	Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup	1
3.	Supervisor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Binjai	1
4.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Binjai	1
5.	Kasubag BIN OPS Polres Binjai	1
6.	Masyarakat	4
JUMLAH		9

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dinas Sosial, Polres, serta masyarakat Kota Binjai menjadi informan dalam penelitian Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai, karena masing-masing memiliki peran dan wawasan yang unik dalam memahami, merespon, dan mengatasi dampak banjir. BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki pengetahuan tentang mitigasi dan pengelolaan bencana, BRI bisa memberikan perspektif terkait aspek keuangan dan ekonomi, Polres terlibat dalam penanganan keamanan dan evakuasi, sementara Dinas Sosial memiliki informasi tentang pemenuhan kebutuhan dasar korban. Melibatkan masyarakat Kota Binjai juga penting karena mereka memiliki pengalaman langsung

tentang dampak banjir dan bisa memberikan wawasan yang berharga serta dapat menjadi bagian dari solusi dalam penanganan bencana tersebut. Pemilihan jumlah informan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mencakup beragam perspektif dan kepentingan yang relevan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Subjek yang diwawancarai pada penelitian ini dikhususkan pada *stakeholders*, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Polres Kota Binjai, Dinas Sosial Kota Binjai, Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai, dan masyarakat di Kota Binjai.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan mengamati dan merekam fenomena atau perilaku yang diamati secara langsung. Untuk mendapatkan informasi maupun data yang lebih akurat dan sistematis peneliti harus melakukan observasi terhadap lokasi yang ingin diteliti. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke beberapa wilayah yang sudah ditetapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian mengacu pada proses mencatat, dan merekam data, temuan, dan proses penelitian secara sistematis. Proses ini mencakup penyimpanan dan pengarsipan dokumen yang relevan seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, gambar dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data sesuai dengan konsep validitas dan reliabilitas dari penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, kriteria serta kerangka berpikir. Keabsahan data adalah sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan benar.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari banyak sekali asal data seperti wawancara, berkas, dan dokumen lain untuk memastikan keandalan data.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk keabsahan data mencakup validasi data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang tidak sama. Contohnya, berita yang diperoleh dari observasi dapat diverifikasi melalui wawancara..

c. Triangulasi Waktu

Waktu bisa mempengaruhi keabsahan data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara di pagi hari, ketika masih segar, umumnya menghasilkan data yang lebih

bernilai. Oleh sebab itu, untuk memperoleh data yang andal, uji reliabilitas data harus diverifikasi melalui observasi, wawancara, serta dokumen pada waktu serta situasi yang tidak sama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Binjai

Binjai adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak kurang lebih 22 km sebelah barat Medan. Sebelum Binjai sebagai kota, Binjai sebagai ibu kota Kabupaten Langkat dan kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan dengan Langkat di barat dan utara dan Deli Serdang di timur dan selatan..

Letak geografis Binjai ialah $03^{\circ}03'40''$ – $03^{\circ}40'02''$ LU dan $98^{\circ}27'03''$ – $98^{\circ}39'32''$ BT. Ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut. Padahal, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan, diukur dari kedua perbatasan yang dipisahkan Deli Serdang. Jalan raya Medan Binjai sepanjang 22 km, 9 km pertama berada di Kota Medan, Km 10 s/d Km 17 berada di Kabupaten Deli Serdang dan dari 17 km Kota Binjai..

Kota Binjai berbatasan dengan beberapa daerah di Sumatera Utara, yaitu:

- a. Batas sebelah Utara : Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Hampan Perak dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Batas sebelah Timur: Kecamatan Sungal dan Kabupaten Deli Serdang.
- c. Batas Sebelah Selatan: Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kecamatan Kutalimbaru serta Kabupaten Deli Serdang.
- d. Batas Sebelah Barat : Kecamatan Selesai dan Kabupaten Langkat.

Terdapat dua sungai yang membelah kota Binjai yaitu sungai Bingai dan Mencirim yang menyediakan air bersih sesuai kebutuhan PDAM Tirta Sari Binjai serta

disalurkan sesuai kebutuhan rakyat. Namun, masih banyak warga di pinggiran kota yang menggantungkan air minumnya dari sumur..

Kota Binja memiliki iklim hutan tropis (Af) dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Data iklim Binjai													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	30.7 (87.3)	31.5 (88.7)	32.1 (89.8)	32.3 (90.1)	32.5 (90.5)	32.6 (90.7)	32.3 (90.1)	32.1 (89.8)	31.4 (88.5)	31.1 (88)	30.6 (87.1)	30.4 (86.7)	31.63 (88.94)
Rata-rata harian °C (°F)	26.0 (78.8)	26.4 (79.5)	26.9 (80.4)	27.2 (81)	27.4 (81.3)	27.3 (81.1)	27.0 (80.6)	26.9 (80.4)	26.7 (80.1)	26.7 (80.1)	26.2 (79.2)	26.0 (78.8)	26.73 (80.11)
Rata-rata terendah °C (°F)	21.4 (70.5)	21.4 (70.5)	21.7 (71.1)	22.2 (72)	22.4 (72.3)	22.0 (71.6)	21.7 (71.1)	21.8 (71.2)	22.1 (71.8)	22.3 (72.1)	21.9 (71.4)	21.7 (71.1)	21.88 (71.39)
Curah hujan mm (inci)	135 (5.31)	107 (4.21)	122 (4.8)	168 (6.61)	207 (8.15)	151 (5.94)	168 (6.61)	193 (7.6)	255 (10.04)	295 (11.61)	274 (10.79)	221 (8.7)	2.296 (90.37)

Sumber: Climate-Data.org^[9]

Gambar 4.1 Data Iklim Kota Binjai

Sumber: "Climate: Binjai"

Visi Walikota Binjai Tahun 2021-2026 ialah "Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius". Visinya meliputi:

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara efektif, efisien, melayani serta profesional.
- Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan warga berwawasan lingkungan
- Mewujudkan sumber daya manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.⁵¹

⁵¹ dinaspariwisata.binjaikota.go.id

4.1.1 Fenomena Banjir Di Kota Binjai

Bencana yang sering terjadi di Kota Binjai adalah banjir dan angin kencang. Bencana banjir dan angin kencang di Kota Binjai bisa menjadi dampak dari cuaca ekstrem atau fenomena alam seperti siklon tropis atau hujan lebat yang berkepanjangan. Banjir bisa disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengakibatkan sungai meluap atau drainase yang buruk. Angin kencang sering kali terjadi bersamaan dengan banjir atau badai, dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur, serta meningkatkan risiko terjadinya bencana lain seperti tanah longsor. Pemerintah setempat dan tim penanggulangan bencana biasanya melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko di masa mendatang.

Bencana banjir di Kota Binjai, Sumatera Utara, merupakan masalah yang sering terjadi, terutama selama musim hujan atau akibat tingginya curah hujan yang berkepanjangan. Faktor-Faktor seperti topografi wilayah, drainase yang buruk, dan pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat memperburuk risiko banjir.

Meskipun upaya mitigasi, banjir masih bisa terjadi dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah preventif guna mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir di Kota Binjai.⁵²

⁵² Hasil Observasi Peneliti

a. Kawasan Rawan Bencana Di Kota Binjai

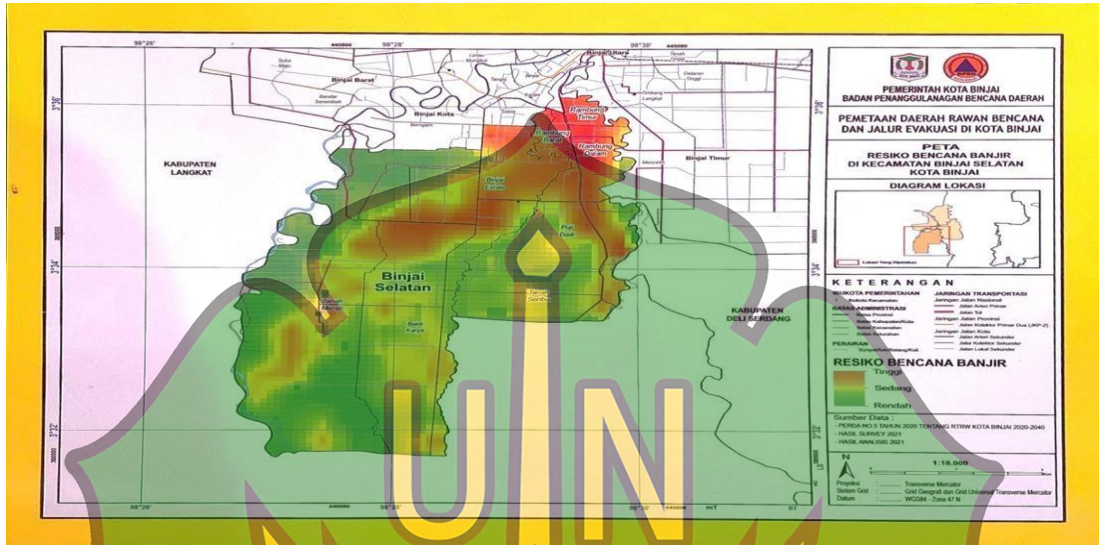
Kawasan Rawan Banjir	
Kecamatan Binjai Selatan	Kelurahan Rambung Barat
	Kelurahan Pujidadi
	Kelurahan Rambung Dalam
	Kelurahan Tanah Merah
	Kelurahan Binjai Estate
Kecamatan Binjai Kota	Kelurahan Setia
Kecamatan Binjai Timur	Kelurahan Mencirim
Sumber : BPBD Kota Binjai	
Kawasan Rawan Angin Puting Beliung	
Kecamatan Binjai Selatan	Kelurahan Rambung Barat
	Kelurahan Pujidadi
	Kelurahan Rambung Dalam
	Kelurahan Marcapada
	Kelurahan Bakti Karya

Kecamatan Binjai Kota	Kelurahan Berngam
Kecamatan Binjai Timur	Kelurahan Mencirim
	Kelurahan Timbang Langkat
Kecamatan Binjai Utara	Kelurahan Nangka
	Kelurahan Jati Makmur
	Kelurahan Kebun Lada
	Kelurahan Cengkeh Turi
	Kelurahan Pahlawan
Kecamatan Binjai Barat	Kelurahan Limau Mungkur

Sumber : BPBD Kota Binjai

Kawasan yang rawan terhadap bencana di Kota Binjai dapat mencakup daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir dan angin kencang. Pemerintah setempat biasanya melakukan identifikasi terhadap kawasan-kawasan yang rawan bencana dan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi.

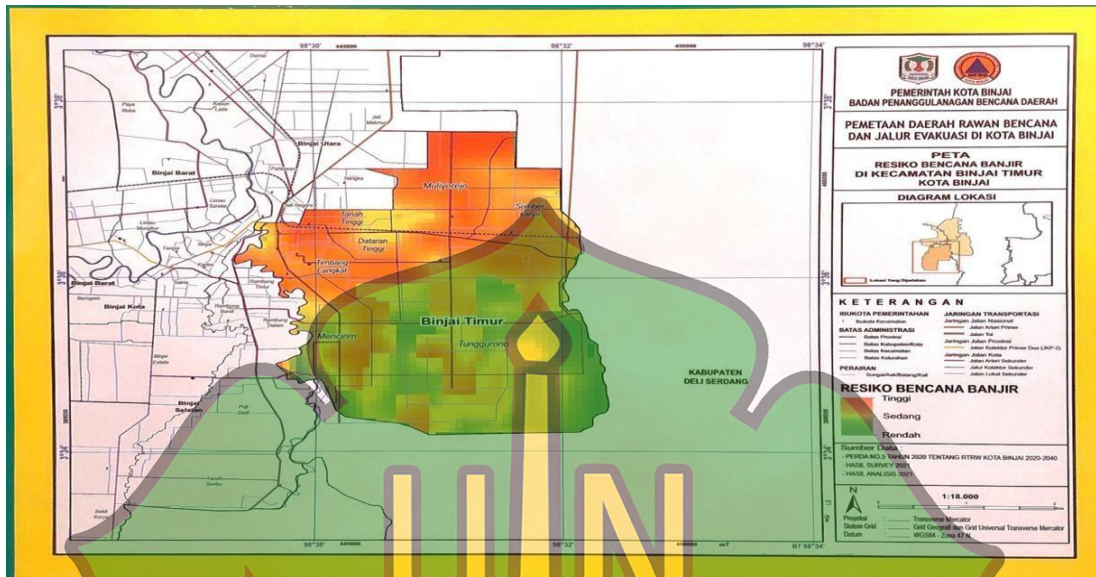
b. Peta Rawan Bencana Banjir Di Kota Binjai



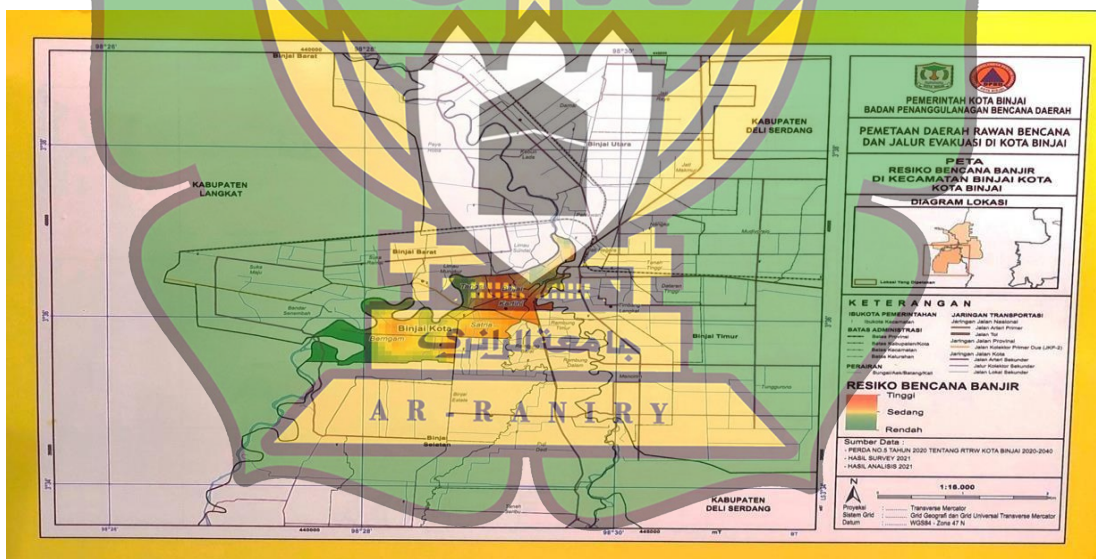
Gambar 4.2 Peta Rawan Bencana Binjai Selatan



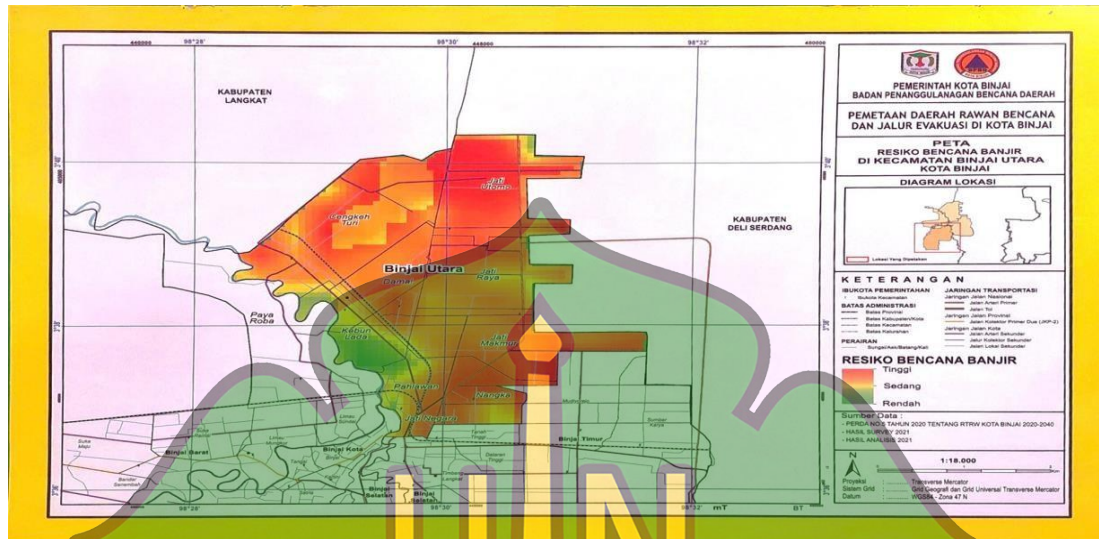
Gambar 4.3 Peta Rawan Bencana Binjai Barat



Gambar 4.4 Peta Rawan Bencana Binjai Timur



Gambar 4.5 Peta Rawan Bencana Binjai Kota



Gambar 4.6 Peta Rawan Bencana Binjai Utara

4.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai

Badan Penanggulangan bencana wilayah (BPBD) Kota Binjai adalah badan pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana kabupaten. BPBD Binjai berperan penting pada upaya kesiapsiagaan, mitigasi, pertolongan serta pemulihan bencana. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga terkait, dan rakyat, untuk mengurangi risiko bencana alam serta melindungi rakyat dari dampaknya.⁵³ Peran mereka mencakup identifikasi dan pemetaan daerah rawan banjir, penyusunan dan pelaksanaan rencana darurat, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan darurat.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Binjai tidak terlepas dari lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya

⁵³ BPBD Kota Binjai

tidak terlepas dari visi dan misi Kota Binjai. Dengan demikian, visi serta misi BPBD Kota Binjai adalah :

Visi:

“ Menjadikan Binjai kota cerdas yang bisa pulih serta berkembang setelah bencana dengan keyakinan akan daya tanggap, kelincahan, serta manajemen bencana”.

4.1.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Binjai ialah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendukung Gubernur Kota Binjai dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pembuangan limbah, serta pengelolaan dampak lingkungan. Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, Dinas Lingkungan Hidup terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mencakup membersihkan puing-puing dan sampah yang terbawa banjir, dan memperbaiki kualitas air dan lingkungan yang terdampak.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai memiliki visi dan misi sebagai berikut untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya :

Visi:

“Untuk menuju Binjai yang sejahtera, kota yang ramah lingkungan dan profesional”

Misi:

1. Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dengan cara yang ramah lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
3. Mengembangkan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
4. Mendukung hukum dan peraturan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan, dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)..⁵⁴

4.1.5 Dinas Sosial Kota Binjai

Salah satu lembaga pemerintah Kota Binjai adalah Dinas Sosial yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka juga biasanya terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat, pendampingan sosial, serta penanggulangan masalah sosial di wilayah tersebut.⁵⁵

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, Dinas Sosial berperan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Tujuan utama Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana ini adalah untuk melindungi dan membantu masyarakat yang paling rentan dalam situasi bencana. Mereka berusaha untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan membantu mereka pulih secepat mungkin.

4.1.6 Kepolisian Resor (Polres) Kota Binjai

Polisi Resor Kota Binjai berlokasi di Kota Binjai, Sumatera Utara. Salah satu tanggung jawabnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di area tersebut serta melakukan penyelidikan, pencegahan, dan penyidik tindak pidana. Polres ini bertanggung jawab atas berbagai aspek keamanan dan penegakan hukum di Kota

⁵⁴ dlhkotabinjai.wordpress.com

⁵⁵ Dinas Sosial Kota Binjai

Binjai.⁵⁶ Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai Polres bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang terkena dampak banjir. Memastikan bahwa bantuan dan evakuasi dapat dilakukan dengan aman. Mereka juga berperan dalam pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan di area yang terendam banjir. Secara umum, dasar dari peran Polres dalam penanggulangan bencana ini adalah upaya menjaga keselamatan masyarakat, mendukung operasional bantuan, dan memastikan ketertiban ditengah situasi yang penuh tekanan.

4.1.7 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Binjai

Bank BRI Kota Binjai menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, pinjaman, transfer, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan digital. Bank BRI juga memiliki program yaitu BRI Peduli.

Program BRI Peduli mencakup berbagai kegiatan, seperti pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan dalam situasi darurat. Melalui BRI Peduli, BRI berupaya untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik serta membantu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang membutuhkan.⁵⁷ BRI sering terlibat dalam program Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BRI ini berupa bantuan kepada korban banjir dalam bentuk makanan, obat, atau barang kebutuhan lainnya. Dalam

⁵⁶ <https://humas.polri.go.id>

⁵⁷ bri.co.id

melaksanakan tindakan tanggap darurat, BRI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain.

Berikut adalah lembaga-lembaga yang berperan serta penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawabnya:

No	Lembaga	Peran
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peran mereka mencakup identifikasi dan pemetaan daerah rawan banjir, penyusunan dan pelaksanaan rencana darurat, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan darurat.
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mencakup membersihkan puing-puing dan sampah yang terbawa banjir, dan memperbaiki kualitas air dan lingkungan yang terdampak.
3.	Dinas Sosial	Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, Dinas Sosial berperan untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir.
4.	Kepolisian Resor	Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, Polres bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang terkena dampak banjir. Memastikan bahwa bantuan dan evakuasi dapat dilakukan dengan aman.
5.	Bank Rakyat Indonesia	Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BRI ini berupa bantuan kepada korban banjir dalam bentuk makanan, obat, atau barang kebutuhan lainnya. Dalam melaksanakan tindakan tanggap darurat, BRI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain.

Tabel 4.1.7
Lembaga dan Peran

4.2 Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai

Banjir adalah ketika banyak air meluap ke tanah yang biasanya kering karena curah hujan yang tinggi atau masalah lain yang menghalangi air untuk diserap oleh tanah atau dialirkan melalui saluran air yang ada. Banjir dapat terjadi secara instan atau bertahap.⁵⁸

Penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai dapat melibatkan beberapa langkah seperti pembangunan sistem drainase yang lebih baik, pengelolaan sampah yang lebih efektif untuk mencegah penyumbatan saluran air, penanaman pohon sebagai penahan aliran air, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penanggulangan banjir di Kota Binjai merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat setempat. Ketika musim hujan datang, Binjai seringkali dihadapkan pada ancaman banjir yang dapat mengancam keamanan warga dan infrastruktur kota. Untuk mengatasi hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai memiliki tim evakuasi yang terlatih siap sedia untuk menyelamatkan warga yang terjebak di daerah terendam banjir. Selain itu, posko pengungsian didirikan di lokasi strategis untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban banjir.

Penanganan bencana banjir di Kota Binjai tidak hanya terbatas pada respons pasca-bencana, upaya mitigasi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pembersihan saluran air dan pengelolaan lahan hijau. Dengan demikian, risiko banjir

⁵⁸ web.bpbd.jatimprov.go.id

di masa depan dapat dikurangi secara signifikan. Kolaborasi aktif antar lembaga dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai.⁵⁹

4.3 Program Kampung Siaga Bencana

Kampung siaga bencana adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Melalui program ini, masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi risiko bencana, membuat rencana evakuasi, dan bekerja sama dalam menghadapi situasi darurat. Program ini membantu mengurangi dampak bencana dan melindungi keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Program Kampung Siaga Bencana ini dibentuk di Kecamatan Binjai Selatan, Program ini telah menjadi tiang penyangga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta terjadi bencana.

Melalui serangkaian pelatihan, penduduk diajarkan untuk mengidentifikasi risiko, merencanakan evakuasi, dan membentuk tim-tim tanggap darurat di setiap lingkungan. Selain itu, program ini juga membangun posko darurat dan jalur evakuasi yang jelas. Penduduk diberikan pengetahuan tentang penggunaan peralatan darurat dan pertolongan pertama, serta dilatih untuk komunikasi efektif dalam situasi krisis.

⁵⁹ BPBD Binjai: Beri Penanganan Khusus Banjir Hingga Pemukiman Terendam, 20 Desember 2023

Kampung Siaga Bencana Kecamatan Binjai Selatan dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128 Tahun 2011 dan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan risiko bencana alam serta memastikan pembentukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam yang berkelanjutan.

Dengan adanya program kampung siaga bencana, masyarakat Binjai Selatan menjadi lebih siap menghadapi ancaman bencana alam, serta mampu memberikan respon yang cepat dan terkoordinasi saat keadaan darurat terjadi.⁶⁰

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai

Menurut Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, wilayah Kota Binjai memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang dapat menyebabkan bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk melakukan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, dan terencana.⁶¹

⁶⁰ Program Kampung Siaga Bencana: Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana, 10 Mei 2024

⁶¹ PERDA Kota Binjai No 3 Tahun 2020 “Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai”

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, kolaborasi antar lembaga dapat melibatkan beberapa pihak, termasuk:

1. Pemerintah Daerah

Melalui dinas terkait seperti BPBP, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana banjir. BPBD bertanggung jawab untuk menyusun rencana tanggap darurat, mengkoordinasikan sumber daya, dan memimpin operasional saat bencana terjadi.

2. Kepolisian

Kepolisian bisa membantu dalam peraturan lalu lintas, evakuasi, dan pengamanan area terdampak. Kepolisian juga terlibat dalam pengamanan area terdampak untuk mencegah penjarahan dan memastikan bahwa proses evakuasi serta distribusi bantuan berjalan lancar.

3. Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

NGO lokal atau internasional dapat memberikan bantuan logistik, pelayanan kemanusiaan, dan dukungan psikososial kepada korban banjir. Mereka juga sering terlibat dalam memberikan dukungan psikososial kepada korban bencana untuk membantu mereka mengatasi trauma akibat bencana.

4. *Volunteer Group* (Kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang dengan tujuan yang sama)

Kelompok relawan dari masyarakat sipil memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan bencana banjir dengan memberikan tenaga tambahan

dalam evakuasi, distribusi makanan, dan penyediaan tempat berlindung. Mereka juga berperan dalam pembersihan dan pemulihan setelah bencana, membantu membersihkan puing-puing dan memperbaiki kerusakan di area yang terdampak.

Secara keseluruhan, semua lembaga dan kelompok tersebut bekerja sama untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif dalam menghadapi bencana banjir, dengan tujuan akhir untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap banjir di Kota Binjai, lembaga-lembaga ini harus bekerja sama. Mereka bekerja bersama untuk menyusun rencana mitigasi bencana, melakukan pemantauan cuaca, memberikan peringatan dini, memberikan bantuan evakuasi dan penyelamatan, serta memberikan rehabilitasi dan pemulihan pasca-bencana.

Indikator yang digunakan untuk mengukur rumusan masalah pertama penelitian ini, yaitu bagaimana kerja sama antar lembaga penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, merujuk pada teori Ansell dan Gash, sebagai berikut:

a. *Face to Face Dialog (Dialog tatap muka)*

Dialog tatap muka dalam kolaborasi antar lembaga melibatkan pertemuan langsung antara perwakilan dari lembaga-lembaga yang terlibat. Melalui dialog tatap muka, lembaga-lembaga dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan pemahaman bersama, dan mengatasi perbedaan untuk mencapai tujuan.

Hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut::

“ Proses kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai melibatkan koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, TNI, Polri, dan PMI, komunikasi yang efektif dan pemahaman peran masing-masing pihak menjadi kunci dalam upaya penanggulangan bencana”.⁶²

Adapun, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Supervisor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Binjai mengemukakan bahwa:

“ Proses Kolaborasi tentang bencana alam, BRI memiliki program yaitu BRI Peduli, maka dari itu BRI peduli dengan sifat yang sosial dan bukan hanya pada bencana alam saja, namun kami juga sering mengunjungi anak yatim piatu dan memberikan bantuan kepada mereka”.⁶³

Sementara itu, Kasubag Pembinaan Operasional Polres Binjai mengemukakan bahwa:

“ Ketika Kota Binjai ini terjadi bencana banjir kita tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganannya termasuk BPBD, TNI/Polri. Kami menggunakan teknologi seperti grup whatsapp untuk penanganannya, di setiap ada bencana banjir ataupun bencana lain kita selalu berkolaborasi untuk turun ke lapangan. Baik itu evakuasi dan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada korban terdampak”.⁶⁴

Kemudian Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, mengemukakan bahwa:

“ Biasanya kami diberi surat tugas atau surat perintah dari Sekda ataupun Walikota dan dinas terkait untuk membantu penanggulangan banjir dan ditentukan kapan dilakukannya gotong royong. Kemudian dari masyarakat juga organisasi karang taruna ikut serta dalam hal penanggulangannya”.⁶⁵

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Surya Sebagai Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai, pada tanggal 19 april 2024

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra sebagai Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai pada tanggal 2 April 2024

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP M. Panggabean sebagai Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai pada tanggal 25 April 2024

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Raja sebagai Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 2 Mei 2024

Dalam hal ini, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Binjai menyatakan bahwa :

“ Penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai melibatkan koordinasi antara pemerintah kota, TNI/Polri, relawan, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Kami bekerja sama dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan tanggap darurat, termasuk distribusi bantuan, penyediaan tempat penampungan, dan pemantauan kondisi terkini.”⁶⁶

Sementara itu pada proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak A, dimana mengemukakan bahwa:

“ Mekanismenya yang dilakukan untuk penanggulangan banjir disini berjalan dengan baik. Koordinasi antar lembaga juga baik karena jika terjadi bencana bantuan dengan segera datang”.⁶⁷

Berikut adalah beberapa rekaman dialog tatap muka antar lembaga yang terlibat, termasuk :



Gambar: 4.7 Rapat Koordinasi BPBD Kota Binjai dengan TNI dalam penanggulangan bencana di Kota Binjai

Sumber : BPBD Kota Binjai, 2023

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Sitorus sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai pada tanggal 21 Mei 2024

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak A sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024



Gambar 4.8 TNI/Polri Memproses Evakuasi Warga Terdampak

Sumber : Kapotres Kota Binjai

Dialog tatap muka antara BPBD Kota Binjai dan Lembaga terkait dalam mitigasi bencana biasanya melibatkan pertemuan langsung antara mereka untuk membahas strategi, koordinasi, dan langkah-langkah konkret dalam menghadapi bencana.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dialog tatap muka antara BPBD Kota Binjai dan lembaga terkait dalam mitigasi bencana. Ini diatur untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan bencana.

Pertemuan ini membahas kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai penting karena dalam pertemuan dapat memberikan

platform bagi berbagai lembaga untuk bertukar informasi tentang pemahaman mereka terhadap risiko banjir, sumber daya yang tersedia, dan strategi mitigasi yang telah terbukti efektif. Dialog tatap muka yang dilakukan memungkinkan lembaga-lembaga terkait untuk mengurangi risiko banjir, seperti pemeliharaan saluran air, pembangunan tanggul, atau perluasan sistem peringatan dini.

Indikator dialog face to face atau dialog tatap muka sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash, yang menunjukkan bahwa lembaga mencapai konsensus awal tentang prosedur kolaborasi yang akan datang.

b. *Trust Building* (Membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan dalam kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai penting karena kepercayaan memperkuat kerjasama antar lembaga. Lembaga-lembaga dapat merespon bencana dengan cepat dan efisien, meminimalkan kerugian dan mempercepat pemulihan. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan hasil wawancara dengan Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai, sebagai berikut:

“ BPBD Kota Binjai ini masih minim dengan yang namanya latihan gabungan, yang seharusnya antara TNI/Polri atau Dinas Sosial dan BPBD setiap daerah melakukan duduk bersama untuk melakukan kolaborasi latihan gabungan. Fungsi dari latihan gabungan tersebut adalah apabila terjadi bencana di Kota Binjai kita jadi tau arahnya kemana dan fungsinya apa dan tetap berkoordinasi kepada siapa. Jadi, untuk di Kota Binjai ini kita melakukan pertemuan itu disaat ada kejadian bencana, kalau tidak ada kita jarang untuk duduk bersama” .⁶⁸

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Surya sebagai Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai pada tanggal 19 April 2024

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai:

“Untuk bencana alam sebenarnya sudah tanggung jawab dari BPBD dan Pemerintah Daerah setempat, jadi disini BRI sebatas untuk mengikuti mereka dan membantu solidaritas untuk masyarakat yang terdampak bencana.”⁶⁹

Sementara itu, Kasubag Pembinaan Operasional Polres Binjai mengemukakan bahwa:

“ Di dalam kolaborasi ada yang namanya pertukaran pengalaman. Dalam penanganan itu mestinya ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BPBD ataupun kepolisian dalam masalah pengamanannya apabila terjadi banjir, kepolisian akan segera turun kelapangan dan mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat terdampak banjir untuk mencari tempat yang lebih tinggi untuk meminimalisir korban bencana”.⁷⁰

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, mengemukakan bahwa:

“ Pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam kolaborasi ini ada, sistemnya itu menggunakan lisan atau melalui telepon antar kepala pimpinan untuk menugaskan kami turun ke lapangan dimana terjadinya suatu bencana.”⁷¹

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial mengatakan bahwa:

“ Untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam kolaborasi tetap ada. Dari Dinsos Provinsi atau dari BPBD Provinsi selalu mengundang kami terkait

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra sebagai Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai pada tanggal 2 April 2024

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP M. Panggabean sebagai Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai pada tanggal 25 April 2024

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Raja sebagai Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 2 Mei 2024

penanggulangan bencana karena Kota Binjai ini juga termasuk dalam daerah rawan bencana.”⁷²

Selanjutnya, Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu M sebagai masyarakat Kota Binjai, mengatakan bahwa:

“ Pertukaran pengalaman ada karena kita juga harus belajar bagaimana menghadapi banjir. Mengenai mekanisme atau inisiatif harus ditingkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang lebih banyak agar kolaborasinya berjalan maksimal.”⁷³

Berdasarkan hasil penelitian, membangun kepercayaan kolaborasi antar lembaga ini muncul setelah adanya dialog tatap muka. Lembaga- lembaga terlibat perlu membangun komunikasi terbuka dan transparan satu sama lain. Komunikasi ini mencakup informasi tentang risiko banjir, sumber daya yang tersedia, dan langkah-langkah yang diambil untuk mitigasi dan tanggap darurat.

Ada kemungkinan bahwa indikator ke dua dari Ansell dan Gash, "Membangun Kepercayaan", telah sesuai dengan kajian yang diteliti karena adanya rasa percaya antara lembaga dalam bekerja sama untuk menangani bencana banjir di kota Binjai. Membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kepercayaan antar lembaga, sehingga komunikasi tidak hanya terjadi secara tatap muka tetapi juga secara virtual.

c. *Commitment to Process* (Komitmen terhadap proses)

Komitmen terhadap proses penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai adalah kesediaan dan keinginan setiap lembaga untuk terlibat secara aktif dan bertanggung

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Sitorus sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan sosial, Dinas Sosial Kota Binjai pada tanggal 21 Mei 2024

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu M sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

jawab dalam seluruh proses penanggulangan bencana. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai adalah sebagai berikut :

“ Upaya untuk memperkuat komitmen terhadap kolaborasi ini yang terpenting hanya komunikasi saja, tidak ada kerjasama yang baik tanpa adanya komunikasi yang baik. Saya pribadi pada tahun 2017 berinisiatif untuk membuat grup Media Center Kota Binjai, di dalam media center Kota Binjai ini didalamnya berisi para stakeholder se Kota Binjai. Kita saling bahu-membahu untuk bekerjasama apabila terjadinya keluhan atau laporan masyarakat terkait bencana”.⁷⁴

Sementara itu Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai mengemukakan:

“ Pada dasarnya BRI sifatnya bergerak pada bidang sosial juga, tetapi bergerak di bidang sosial bukan semata-mena tidak melakukan izin ataupun lapor kepada pemerintah daerah setempat. Untuk penyaluran bantuan agar tersalurkan secara akurat kami menggandeng pemerintah daerah setempat agar sistemnya lebih cepat”.⁷⁵

Kemudian, Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai mengemukakan bahwa:

“ Untuk memperkuat komitmen ini harus adanya kerjasama antar lembaga terkait turun kelapangan untuk memahami tugas pokoknya masing-masing. Baik itu kepolisian turun untuk masalah pengamanan dan penyelamatannya. Bukan hanya pada pengamanan, pihak dari polisi juga ikut menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana”.⁷⁶

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasubag Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, dimana mengemukakan sebagai berikut:

“ Upaya untuk memperkuat komitmen ini biasanya masing-masing lembaga terkait untuk memahami tugas dan fungsinya. Kalau Dinas Lingkungan Hidup,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Surya sebagai Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai pada tanggal 19 April 2024

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Putra sebagai Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai pada tanggal 2 April 2024

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP M. Panggabean sebagai Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai pada tanggal 25 April 2024

kami biasanya mengedukasi masyarakat untuk membantu kegiatan gotong royong.”⁷⁷

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai dalam proses wawancara mengemukakan bahwa:

“Upaya untuk memperkuat komitmen itu ada, karena penanggulangan bencana ini tidak bisa hanya satu orang yang menangani. Untuk meminimalkan bencana kita gotong royong dengan lembaga-lembaga terkait. Kita sering membersihkan daerah aliran sungai mencirim untuk meminimalkan bencana.”⁷⁸

Berikut beberapa dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam proses observasi:



Gambar 4.9 Mitigasi bersama warga untuk membersihkan drainase
Sumber : BPBD Kota Binjai, 2023

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Raja sebagai Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 2 Mei 2024

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Sitorus sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial pada tanggal 21 Mei 2024



Gambar 4.10 Mitigasi bersama pihak kelurahan Rambung Barat untuk membersihkan aliran sungai Bangkatan

Sumber : BPBD Kota Binjai, 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memainkan peran yang cukup besar dalam pengurangan bencana banjir di Kota Binjai. Partisipasi masyarakat dalam program-program mitigasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif tentang rencana mitigasi dan risiko banjir.

Karena ada komitmen dari lembaga terkait dan masyarakat setempat dalam proses kerja sama penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, indikator komitmen terhadap proses dari Ansell dan Gash pada penelitian ini dianggap berhasil.

d. *Shared Understanding* (Saling memahami)

Indikator *shared understanding* (saling memahami) dari Ansell dan Gash sangat penting. Dalam indikator ini, semua lembaga terlibat termasuk pemerintah kota,

lembaga non-pemerintah, dan masyarakat setempat harus memiliki pemahaman yang sama tentang risiko banjir, upaya penanggulangan yang dilakukan, peran masing-masing pihak, serta harapan dan tujuan bersama dalam mengurangi dampak bencana. Dengan saling memahami yang kuat, kolaborasi dapat berjalan lebih lancar dan lebih efektif dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh Kota Binjai terkait banjir.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai mengenai, bagaimana lembaga-lembaga terlibat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai:

“ Kita disini menyampaikan kepada stakeholder terkait bahwasannya bencana atau banjir genangan di perumahan atau di lingkungan warga, itu bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah tetapi itu tanggung jawab kita bersama. Jadi, kita tidak berhenti menyampaikan kepada warga atau ke pihak lembaga terkait bahwasannya kita harus sama-sama menjaga lingkungan, terutama di lingkungan sekitar kita”.⁷⁹

Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir dan peran mereka dalam upaya penanggulangannya di Kota Binjai, dalam wawancara Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai mengemukakan bahwa:

“ Untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini pasti, kalau melibatkan masyarakat biasanya kami kebanyakan melakukan kebersihan, contoh kolaborasinya itu seperti membersihkan sungai ataupun kepedulian kepada lingkungan untuk mengurangi agar tidak terjadi dampaknya bencana alam”.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Surya sebagai Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai pada tanggal 19 April 2024

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra sebagai Supervisor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Binjai pada tanggal 2 April 2024

Kemudian Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai dalam wawancara, mengemukakan bahwa:

“ Masyarakat proaktif dalam masalah ini, karena setiap kali kita lihat saat terjadi banjir maka masyarakat melakukan penggalangan dana dan membuat kotak bantuan. Baik pemerintah, baik pun masyarakat semuanya tetap berkolaborasi dan bekerja sama untuk penanganan apabila terjadi banjir”.⁸¹

Kemudian Hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Umum Dinas Lingkungan Kota Binjai, sebagai berikut:

“ Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir itu hanya sekedar dalam mengingatkan masyarakat untuk saling menjaga kebersihan terutama pada aliran air.”⁸²

Dalam hal ini Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai, mengemukakan bahwa:

“ Ada, kita juga melibatkan masyarakat untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana ini. Kita selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa aliran sungai itu bukan tempat untuk membuang sampah.”⁸³

Sementara hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu M sebagai masyarakat Kota Binjai, dimana mengemukakan bahwa:

“ Kami ikut terlibat karena kami disini bisa dibilang sebagai korban dari bencana banjir tersebut.”⁸⁴

Dapat kita ketahui bahwa indikator saling memahami dalam kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai sangat penting. Dengan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP M. Panggabean sebagai Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai pada tanggal 25 april 2024

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Raja sebagai Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 2 Mei 2024

⁸³ Hasil Wawancara dengan bapak Hendra Sitorus sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai pada tanggal 21 Mei 2024

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu M sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

peran yang kuat tentang peran masing-masing lembaga maupun masyarakat yang terlibat, koordinasi dan tindakan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, meminimalkan kerugian dan meningkatkan respons terhadap bencana tersebut.

Indikator *shared understanding* (saling memahami) dalam kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di kota binjai ini terbukti sesuai, karena terdapat komunikasi yang efektif antar lembaga terkait, pertukaran informasi yang lancar, koordinasi yang baik dalam tindakan tanggap darurat, serta pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi.

e. ***Intermediate Outcome*** (Hasil akhir)

Indikator *intermediate outcome* (hasil akhir) dari kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai mencakup pencapaian langsung yang menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kesiapan, koordinasi, dan respons terhadap bencana banjir.

Menurut Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai mengenai, bagaimana kolaborasi antar lembaga telah mempengaruhi efisiensi dan efektifitas dalam penyaluran bantuan dan respons darurat saat terjadi banjir di Kota Binjai:

“ Kolaborasi yang selama ini yang kita jalani cukup baik. Jadi, sama-sama saling bahu membahu dalam membantu atau mengevakuasi warga yang terdampak bencana dan sama-sama saling membantu apabila ada warga terdampak butuh bantuan seperti makanan siap saji dan membuka dapur umum.

Untuk membuka dapur umum tersebut disitu para lembaga terkait ikut bergabung.”⁸⁵

Sementara itu, dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Supervisor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kota Binjai sebagai berikut:

“ Melalui kolaborasi, lembaga terkait dapat menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing secara lebih jelas dalam penyaluran bantuan dan respons darurat. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa setiap aspek dari respons darurat ditangani dengan baik.”⁸⁶

Sementara itu Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai dalam wawancara, mengemukakan sebagai berikut:

“ Kalau kita lihat dengan proaktifnya lembaga terkait untuk turun ke lapangan bersama-sama. Apabila terjadinya hujan yang berkepanjangan kita saling mengingatkan untuk selalu mempersiapkan yang namanya tanggap bencana dan saling bertukar informasi mengenai tugasnya masing-masing dalam penanggulangan banjir tersebut.”⁸⁷

Kemudian, Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam wawancara, mengemukakan bahwa:

“Kolaborasi ini telah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan. Biasanya kami bersama pihak kelurahan untuk mengumpulkan bantuan dari masyarakat untuk bergotong royong, dari pihak BPBD sendiri dalam penanggulangannya, dan dari Dinas Sosial juga ikut membantu dalam masalah tersebut.”⁸⁸

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Surya sebagai Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai pada tanggal 19 April 2024

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Putra sebagai Supervisor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Binjai pada tanggal 2 April 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP M. Panggabean sebagai Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai pada tanggal 25 April 2024

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Raja sebagai Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 2 Mei 2024

Dalam hal ini Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai, mengemukakan bahwa:

“ Secara otomatis dengan melibatkan lembaga-lembaga yang terkait dalam penyaluran bantuan ini adalah untuk memastikan penyaluran bantuan itu tepat sasaran.”⁸⁹

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan meminimalkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan.

Kolaborasi telah menghasilkan hasil akhir, yaitu koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lembaga terkait, relawan, dan masyarakat setempat. Dengan bekerja sama, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih efisien. Secara lebih terorganisir dan merata, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendidikan tentang cara menghadapi bencana banjir, persiapan untuk bencana, dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Secara keseluruhan, hasil akhir dari progres kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai adalah meningkatnya kesiapan dan kemampuan bersama dalam menghadapi bencana, serta berkurangnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana banjir bagi masyarakat dan lingkungan.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Sitorus sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai pada tanggal 21 Mei 2024

4.4.2 Faktor Penghambat Dalam Upaya Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai

Menurut rumusan masalah kedua yang diteliti, ada beberapa hal yang menghambat kerja sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terbatas dapat menghalangi kerja sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai. Kurangnya pengetahuan tentang strategi penanggulangan bencana banjir, banyak sumber daya manusia yang kurang memahami strategi yang efektif untuk mengurangi risiko dan dampak banjir, seperti pemeliharaan saluran air, pengelolaan tanggul, atau evakuasi darurat.

Penanggulangan bencana banjir memerlukan kemampuan untuk mengelola krisis secara efektif, termasuk pengambilan keputusan cepat, koordinasi tim, dan komunikasi yang efektif dengan publik. Kurangnya pelatihan dalam hal ini dapat menghambat respons cepat dan terkoordinasi saat terjadi bencana.

Hasil dari wawancara peneliti dengan Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai menunjukkan bahwa :

“ Faktor penghambat tetap ada, termasuk keterbatasan SDM dalam hal ini. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang memadai dalam penanganan bencana banjir dapat menghambat efektivitas kolaborasi, karena mereka mungkin tidak

mampu mengambil tindakan yang diperlukan atau berkontribusi secara optimal”.⁹⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam proses wawancara dengan peneliti, yaitu:

“ Kurangnya kesadaran tentang masalah lingkungan jadi mengakibatkan kurangnya dukungan dari SDM terhadap kebijakan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini yang jadi penghambat upaya kolaborasi dalam melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir”.⁹¹

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Binjai, melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan bahwa :

“ Faktor penghambatnya itu jelas ada pada kesadaran masyarakat. Masyarakat terlalu bergantung pada pemerintah, sehingga dalam kebersihan saluran airpun mereka berharap pemerintah untuk membersihkan. Seharusnya disini kita harus memiliki kesadaran sendiri atas kebersihan lingkungan disekitar kita.”⁹²

Kekurangan keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana, seperti keterampilan teknis dalam analisis risiko banjir, hal ini dapat mengurangi efektivitas upaya kolaborasi karena kurangnya pemahaman yang sama diantara lembaga-lembaga yang terlibat maupun masyarakat.

Tanpa sumber daya manusia yang memadai, lembaga-lembaga terlibat bisa kesulitan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek penanggulangan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP M. Panggabean selaku Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai pada tanggal 25 April 2024

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Raja sebagai Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 2 Mei 2024

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Hendra Sitorus sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Binjai pada tanggal 21 Mei 2024

bencana dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas respons terhadap bencana banjir di Kota Binjai.

b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap koordinasi dan respon yang diberikan lembaga terkait

Kepuasan masyarakat terhadap koordinasi dan respons lembaga terkait dalam bencana banjir di Kota Binjai sangat penting karena itu menentukan efektivitas dan efisiensi penanganan bencana serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Kepercayaan publik yang terjaga akan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Adapun dari hasil wawancara dengan bapak A sebagai masyarakat di Kota Binjai mengemukakan sebagai berikut:

“Kepuasan saya sebagai masyarakat terhadap koordinasi dan respons cepat yang diberikan oleh lembaga terkait dalam penanggulangan banjir di Kota Binjai ini saya merasa puas. Karena menurut saya lembaga-lembaga terkait begitu cekatan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut”.⁹³

Selama wawancara, Ibu Y menyatakan bahwa:

“Saya cukup puas karena lembaga terkait memberikan respons yang baik ketika banjir terjadi. Mereka segera mengangkut warga ke tempat yang lebih aman dan memberikan bantuan kepada komunitas yang terkena dampak.”⁹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah puas dengan koordinasi dan respons lembaga terkait dalam penanggulangan banjir di Kota Binjai. Adanya komunikasi yang efektif dan transparan antara lembaga terkait dan masyarakat,

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak A sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Y sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

sehingga informasi tentang langkah-langkah penanggulangan dapat disampaikan dengan jelas.

Kepercayaan masyarakat merupakan hal utama untuk kerjasama dan partisipasi dalam upaya penanggulangan bencana. Pentingnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait dalam penanggulangan banjir di Kota Binjai tidak bisa diabaikan, karena hal itu merupakan kunci efektivitas, stabilitas, dan pemulihan pasca-bencana yang berhasil.

Dengan mempertimbangkan temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu R mengenai kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga-lembaga terkait dalam menghadapi bencana banjir, sebagai berikut:

“ Sebagai masyarakat yang terdampak tentunya sangat berharap dan yakin lembaga-lembaga terkait akan segera menemukan solusi agar bencana banjir dapat diatasi.”⁹⁵

Bapak A, yang merupakan anggota masyarakat Kota Binjai, juga menyampaikan hal ini selama wawancara yang dilakukan oleh peneliti::

“Sebagai anggota masyarakat, saya yakin bahwa lembaga-lembaga terkait telah berkolaborasi dan sigap dalam menangani bencana banjir yang terjadi di Kota Binjai.”⁹⁶

Upaya kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait terhadap penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai menjadi harapan masyarakat bahwa kolaborasi ini akan memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efisien dalam menghadapi bencana banjir. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu R sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak A sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

memperkuat kapasitas penanggulangan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.

Setelah terbentuknya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, penyaluran bantuan dan sumber daya bagi korban banjir cenderung lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Hal ini dapat mengurangi tumpang tindih dalam bantuan yang diberikan serta memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang membutuhkan dengan lebih cepat dan tepat. Melalui kolaborasi, ide-ide baru dapat muncul dari perspektif yang beragam. Kolaborasi ini guna untuk pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar individu atau entitas, yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman.

Kolaborasi memperkuat hubungan antar individu, kelompok, atau organisasi, yang dapat bermanfaat dalam jangka panjang untuk pertukaran informasi dan dukungan. Dengan bekerjasama, kolaborasi memiliki potensi untuk mencapai dampak yang lebih besar daripada usaha individu.

Perubahan hal positif dalam penyaluran bantuan dan sumber daya bagi korban banjir setelah terbentuknya kolaborasi antar lembaga meningkatkan efektivitas dalam membantu korban banjir, meningkatkan ketersediaan bantuan dan sumber daya. Kolaborasi antar lembaga juga akan meningkatkan dukungan psikososial bagi korban banjir, karena lebih banyak sumber daya yang terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka, baik secara fisik maupun mental.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Y, yang merupakan warga Kota Binjai, peneliti menemukan bahwa :

“Iya, setelah terbentuknya kolaborasi antar lembaga bantuan dan sumber daya yang diberikan kami semakin meningkat sehingga kerugian kami akibat bencana banjir ini juga berkurang.”⁹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak A dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“ Hal positif yang saya lihat dari kolaborasi ini adalah mereka saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk membantu dan menangani masyarakat yang terkena dampak banjir.”⁹⁸

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kolaborasi ini berjalan dengan cukup baik dan upaya bersama antar lembaga-lembaga terlibat telah memberikan hasil yang berarti dalam menghadapi tantangan bencana alam. Untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dan infrastruktur kota, orang dapat bekerja sama dengan baik. Adanya pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga setelah setiap kejadian bencana merupakan bukti kolaborasi yang positif. Melalui kolaborasi, lembaga-lembaga terlibat dapat saling belajar dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani bencana di masa yang akan datang.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Y sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak A sebagai masyarakat Kota Binjai pada tanggal 26 April 2024

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian kolaboratif tentang penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai adalah sebagai berikut::

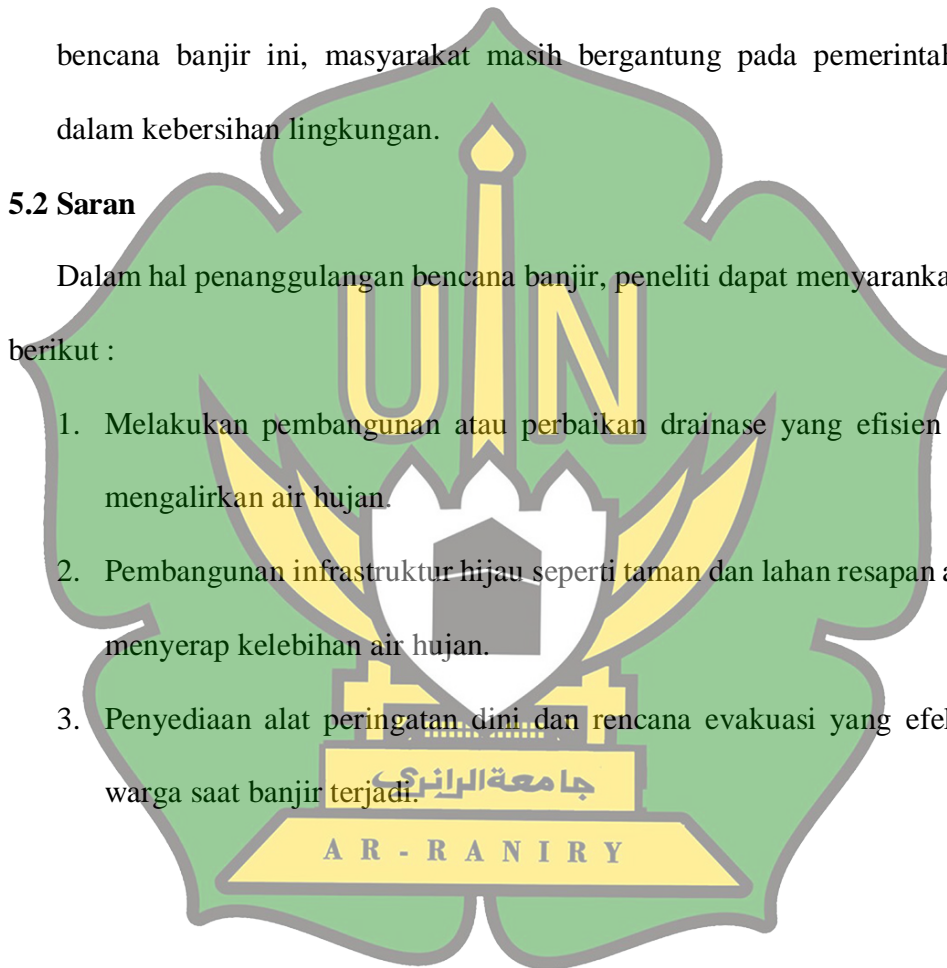
1. Kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai sudah dilaksanakan, diawali dengan tahap: (1) Dialog tatap muka, di mana semua pihak terlibat berkumpul langsung untuk membahas lebih lanjut tentang penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai. (2) Untuk membangun kepercayaan, lembaga terkait harus berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang terbuka atau transparan untuk mencapai tujuan bersama. (3) Komitmen terhadap proses kolaborasi, seperti bekerja sama dalam mitigasi bencana, adalah salah satu contohnya. (4) Pada tahap saling memahami, peran masing-masing lembaga maupun masyarakat setempat, Koordinasi antar dan tindakan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. (5) Hasil akhir yang dicapai dari kolaborasi ini adalah terdapat koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Polres, Bank Rakyat Indonesia, relawan, dan masyarakat setempat.
2. Adapun faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai, kurangnya pengetahuan tentang strategi penanggulangan bencana banjir, banyak sumber daya manusia yang kurang memahami strategi yang efektif untuk mengurangi risiko dan dampak

banjir, seperti pemeliharaan saluran air, pengelolaan tanggul, atau evakuasi darurat. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya juga menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir ini, masyarakat masih bergantung pada pemerintah perihal dalam kebersihan lingkungan.

5.2 Saran

Dalam hal penanggulangan bencana banjir, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut :

1. Melakukan pembangunan atau perbaikan drainase yang efisien untuk mengalirkan air hujan.
2. Pembangunan infrastruktur hijau seperti taman dan lahan resapan air untuk menyerap kelebihan air hujan.
3. Penyediaan alat peringatan dini dan rencana evakuasi yang efektif bagi warga saat banjir terjadi.



Daftar Pustaka

A. Buku

Djumara, Noorsyamsya.2008. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara-RI. h. 36-38

Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, h. 7

Maharani, L., Punaiji, S., & Saida, U. (2017). Pemanfaatan Social Learning Network

Dalam Mendukung Keterampilan Kolaborasi Siswa. *Prosiding TEP & PDS*, 167-172.

Modul 01 Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi

Modul 02 “ Modul Manajemen Penanggulangan Bencana; Pelatihan Penanggulangan

Bencana Banjir” Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Rekonstruksi, 2017 (9/3/2024)

Zuldafril. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka

B. Jurnal

Administratio,Civil Society (*Indonesian Islamic Business Forum*) Dalam Pemulihan

Ekonomi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda Vol. 13 (2) 2022:

177-190

Akhmad Nafarin; Sidharta Adyatma; Deasy Arisanty; Selamat Riadi “ Model

Pengelolaan Daerah Rawan Bencana Banjir Berbasis Masyarakat

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”

7/2/2024

Anderson, E.T. & J. McFarlane, *Community as Partner Theory and Practice in Nursing* 4th ED. Philadelphia, 2004.

Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective*, 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009)

7/3/2024

Chris Ansell Alison Gash, "Collaborative Governance In Theory And Practice University Of California, Berkeley," *Journal Administration Research And Theory JPART* 18 (13 November 2007): 543–571

Dema, Rivaldhi, Arimurti: *Model Manajemen Bencana Gunung Meletus Di Gunung Kelud*, "Pengutipan; Saputra, Alfaridzi, Kriswibowo, A. (2020). *Public Administration Journal of Research*" (9/3/2024)

Dimas Kurniawan Putra, dkk. *International Journal Of Arts and Social Science*. Vol 5 Issue 4. April 2022.

Dimas, Syamsul, Lilik, Pujo, & Herlina (2022) "Strategi Pemerintah Provinsi Riau dan Stakeholder Yang Bertanggung Jawab Dalam Penanganan Covid-19 di Prov Riau

Linya Ketzia Chlodya Br Tobing " Strategi Komunikasi BPBD Dalam Mensosialisasikan Informasi Bencana Banjir di Kota Binjai"

Mochamad Arfani. *Jurnal Syntax Transformation, KOLABORASI PENTAHELIX DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA*. Vol. 3, No. 1, Januari 202

Nahot Tua Parlindungan. *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir*

Di Kota Medan. Vol 6, Februari 2022

Rizky Chairil, (2020) “Analisis Tingkat Kerentanan dan Karakteristik Banjir di Kecamatan Bejenis Kota Tebing Tinggi” 6/3/2024

Sambodo, E. (2018, 05 28). Manajemen Bencana. Retrieved from endrosambodo1984.wordpress.com:

<https://endrosambodo1984.wordpress.com/2012/04/18/manajemen-bencana/>

Sudarmo, Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance, Surakarta: SMART Media, MAP UNS, 2011, h. 110-116 (9/3/2024)

Wikan Galoh Widyarto, “Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi.” *Jurnal Nusantara* Vol. 4, no. Nomor 2 (Oktober 2017): 100-106

C. Website

BNPB “Tren Banjir Di Indonesia Cenderung Menurun Dalam Tiga Tahun Terakhir” 4/3/2024

BPBD Provinsi Jawa Timur “ Banjir: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya” 4/3/2024

BPBD Sumatera Utara (6/4/2024)

<https://pekalongankota.go.id/berita/penanggulangan-bencana-perlu-kerjasama-lintas-sektor.html>

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-d-KOTA-BINJAI-SUMATERA-UTARA-06-10-2023-84>

Kementerian Kesehatan “Banjir di Kota-Binjai, Sumatera-Utara” 4/3/2024

Nabilah Muhamad “Sumatera Utara, Provinsi Paling Sering Dilanda Banjir Pada 2023”

PPID Pelaksana BPSDM Prov Jateng “Bencana Banjir” 5/2/2024

<https://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/bencana/Apa-itu-banjir-dan-cara-menghadapi-bencana-banjir.pdf> 5/2/2024

E. Regulasi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana


PERDA Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Kota Binjai

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 1 SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2163/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.011.3.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Siti Nur Zalicha, M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Hijrah Saputra, S.Fil., M.Kesos. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Siti Arbianti

NIM : 200802021


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Banjir di Kota Binjai

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 14 November 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



ANULI MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian

4/20/24, 11:10 AM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-646/Un.08/FISIP.LPP.00.9/03/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
3. Kepala Dinas Sosial Kota Binjai
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai
5. Kepala Bank BRI Cabang Kota Binjai


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI ARBIANTI / 200802021**
 Semester/Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**
 Alamat sekarang : **Jl. Inong Balce, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2024
 an. Dekan
A R - R A N I R Y
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 September 2024 Eka Januar, M.Soc.Sc.

<https://mahasiswa.slakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian> 1/1

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl.Jend.Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 – 8823619 Fax. 061 - 8823619
 Binjai 20717
 Email : bakesbangbinjai@yahoo.com

Binjai, 29 April 2024

Nomor : 0009.2-CC.00
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth :
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Di:
 Banda Aceh

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat nomor:6081 / UN45.1.1 / PK.01.06 / 2023 Tanggal 24 Maret 2024 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Siti Arbianti
 NIM : 200802021
 Alamat : Desa Suka Damai, Kec. Hinai, Kab. Langkat
 Judul : “Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Binjai”
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Tempat Penelitian : Dinas Sosial Kota Binjai
 Lamannya : 3 (tiga) Hari
 Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan / peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan / ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BINJAI**
 Drs. RUSLIANTO, M.Pd
 PEMBINA Tk.I
 NIP.196706211997021002

Tembusan :

- Bapak Wali Kota Binjai (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Kota Binjai
- Kepala Dinas Sosial Kota Binjai
- Yang Bersangkutan
- Arsip

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

1. Bagaimana mekanisme kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
2. Bagaimana proses koordinasi antar lembaga dalam mendistribusikan bantuan dan sumber daya saat terjadi banjir di Kota Binjai?
3. Apakah ada pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam menghadapi bencana banjir?
4. Apakah terdapat mekanisme atau inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antar lembaga setelah terjadi bencana banjir di Kota Binjai?
5. Apakah terdapat upaya untuk memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi dengan melibatkan stakeholder eksternal dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
6. Apakah terdapat kesepakatan bersama atau perjanjian formal yang menegaskan komitmen setiap lembaga terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir?
7. Bagaimana bentuk kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

8. Apakah terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir dan peran mereka dalam upaya penanggulangannya di Kota Binjai?
9. Bagaimana lembaga-lembaga terlibat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
10. Apakah terdapat forum atau sesi briefing yang diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana banjir?
11. Bagaimana kolaborasi antar lembaga telah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan dan respon darurat saat terjadi banjir di Kota Binjai?
12. Apakah terdapat perubahan dalam rencana dan strategi jangka panjang dalam penanggulangan bencana banjir yang dihasilkan melalui kolaborasi antar lembaga di Kota Binjai?
13. Apa saja faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

B. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

1. Bagaimana mekanisme kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

2. Bagaimana proses koordinasi antar lembaga dalam mendistribusikan bantuan dan sumber daya saat terjadi banjir di Kota Binjai?
3. Apakah ada pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam menghadapi bencana banjir?
4. Apakah terdapat mekanisme atau inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antar lembaga setelah terjadi bencana banjir di Kota Binjai?
5. Apakah terdapat upaya untuk memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi dengan melibatkan stakeholder eksternal dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
6. Apakah terdapat kesepakatan bersama atau perjanjian formal yang menegaskan komitmen setiap lembaga terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir?
7. Bagaimana bentuk kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
8. Apakah terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir dan peran mereka dalam upaya penanggulangannya di Kota Binjai?
9. Bagaimana lembaga-lembaga terlibat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

10. Apakah terdapat forum atau sesi briefing yang diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana banjir?
11. Bagaimana kolaborasi antar lembaga telah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan dan respon darurat saat terjadi banjir di Kota Binjai?
12. Apakah terdapat perubahan dalam rencana dan strategi jangka panjang dalam penanggulangan bencana banjir yang dihasilkan melalui kolaborasi antar lembaga di Kota Binjai?
13. Apa saja faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

C. Polres Kota Binjai

1. Bagaimana mekanisme kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
2. Bagaimana proses koordinasi antar lembaga dalam mendistribusikan bantuan dan sumber daya saat terjadi banjir di Kota Binjai?
3. Apakah ada pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam menghadapi bencana banjir?

4. Apakah terdapat mekanisme atau inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antar lembaga setelah terjadi bencana banjir di Kota Binjai?
5. Apakah terdapat upaya untuk memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi dengan melibatkan stakeholder eksternal dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
6. Apakah terdapat kesepakatan bersama atau perjanjian formal yang menegaskan komitmen setiap lembaga terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir?
7. Bagaimana bentuk kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
8. Apakah terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir dan peran mereka dalam upaya penanggulangannya di Kota Binjai?
9. Bagaimana lembaga-lembaga terlibat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
10. Apakah terdapat forum atau sesi briefing yang diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana banjir?

11. Bagaimana kolaborasi antar lembaga telah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan dan respon darurat saat terjadi banjir di Kota Binjai?
12. Apakah terdapat perubahan dalam rencana dan strategi jangka panjang dalam penanggulangan bencana banjir yang dihasilkan melalui kolaborasi antar lembaga di Kota Binjai?
13. Apa saja faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota binjai?

D. Dinas Sosial Kota Binjai

1. Bagaimana mekanisme kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
2. Bagaimana proses koordinasi antar lembaga dalam mendistribusikan bantuan dan sumber daya saat terjadi banjir di Kota Binjai?
3. Apakah ada pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam menghadapi bencana banjir?
4. Apakah terdapat mekanisme atau inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antar lembaga setelah terjadi bencana banjir di Kota Binjai?
5. Apakah terdapat upaya untuk memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi dengan melibatkan stakeholder eksternal dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

6. Apakah terdapat kesepakatan bersama atau perjanjian formal yang menegaskan komitmen setiap lembaga terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir?
7. Bagaimana bentuk kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
8. Apakah terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir dan peran mereka dalam upaya penanggulangannya di Kota Binjai?
9. Bagaimana lembaga-lembaga terlibat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
10. Apakah terdapat forum atau sesi briefing yang diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana banjir?
11. Bagaimana kolaborasi antar lembaga telah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan dan respon darurat saat terjadi banjir di Kota Binjai?
12. Apakah terdapat perubahan dalam rencana dan strategi jangka panjang dalam penanggulangan bencana banjir yang dihasilkan melalui kolaborasi antar lembaga di Kota Binjai?

13. Apa saja faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

E. Bank Rakyat Indonesia Kota Binjai

1. Bagaimana mekanisme kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
2. Bagaimana proses koordinasi antar lembaga dalam mendistribusikan bantuan dan sumber daya saat terjadi banjir di Kota Binjai?
3. Apakah ada pertukaran pengalaman dan pembelajaran antar lembaga untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama dalam menghadapi bencana banjir?
4. Apakah terdapat mekanisme atau inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan antar lembaga setelah terjadi bencana banjir di Kota Binjai?
5. Apakah terdapat upaya untuk memperkuat komitmen terhadap proses kolaborasi dengan melibatkan stakeholder eksternal dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
6. Apakah terdapat kesepakatan bersama atau perjanjian formal yang menegaskan komitmen setiap lembaga terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir?
7. Bagaimana bentuk kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

8. Apakah terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bersama mengenai risiko bencana banjir dan peran mereka dalam upaya penanggulangannya di Kota Binjai?
9. Bagaimana lembaga-lembaga terlibat memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?
10. Apakah terdapat forum atau sesi briefing yang diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan bencana banjir?
11. Bagaimana kolaborasi antar lembaga telah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan dan respon darurat saat terjadi banjir di Kota Binjai?
12. Apakah terdapat perubahan dalam rencana dan strategi jangka panjang dalam penanggulangan bencana banjir yang dihasilkan melalui kolaborasi antar lembaga di Kota Binjai?
13. Apa saja faktor penghambat dalam upaya kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai?

F. Masyarakat Umum

1. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap koordinasi dan respons yang diberikan oleh lembaga-lembaga terkait saat terjadi banjir di Kota Binjai?

2. Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap kemampuan lembaga-lembaga terkait dalam menghadapi bencana banjir setelah melihat upaya kolaborasi mereka?
3. Apakah Anda melihat adanya perubahan positif dalam penyaluran bantuan dan sumber daya bagi korban banjir setelah terbentuknya kolaborasi antar lembaga? Menurut pengalaman Anda atau pengamatan Anda, bagaimana peran lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir di Kota Binjai?
 - a. Apakah Anda melihat adanya koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam penanganan bencana banjir di Kota Binjai?



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Koordinator Pusdalops BPBD Kota Binjai



Wawancara dengan Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup



Wawancara dengan Supervisor Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai



Wawancara dengan Kasubag BIN OPS Polres Kota Binjai



Wawancara dengan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota
Binjai





Wawancara dengan masyarakat Kec. Binjai Kota



Wawancara dengan masyarakat Kec. Binjai Selatan



Wawancara dengan masyarakat Kec. Binjai Utara



Wawancara dengan masyarakat Kec. Binjai Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Siti Arbianti
 Tempat Tanggal Lahir : Sukadamai, 25 September 2001
 Nomor Handphone : 081368941677
 Alamat : Desa Sukadamai
 E-Mail : sitiarbianti648@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 050713
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Hinai
 Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 1 Stabat

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : Baik|2023|Ma'had Al-Jami'ah UIN Ar-Raniry
 TOEFL : 400|2024|Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A-|2020|FISIP400|Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : Sangat Baik|2023|BPBA